



TIM PENYUSUN SAKIP



Laporan
Kinerja Pemerintah
Kabupaten Bengkulu

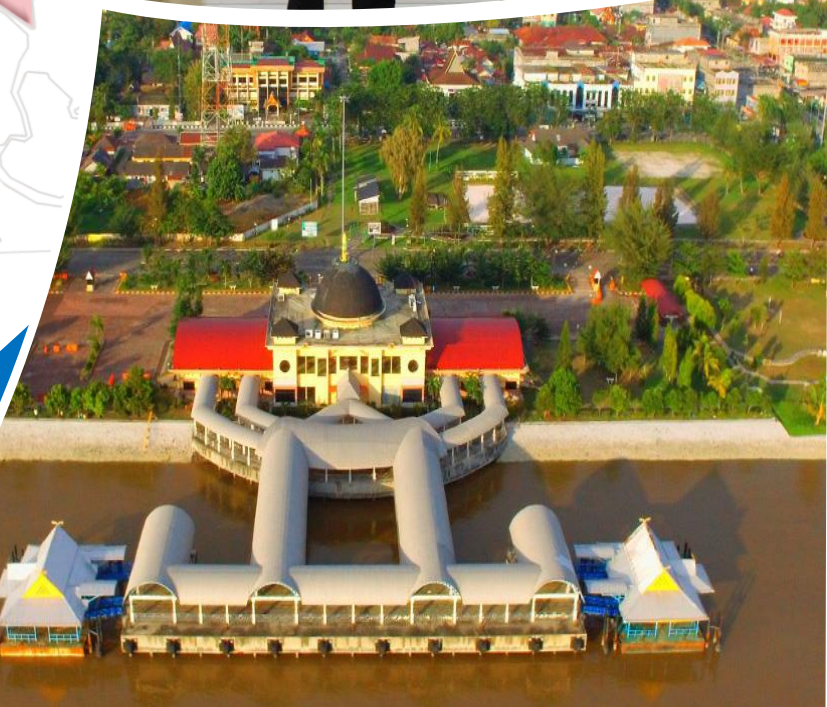
Tahun
2021

HASIL PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR
TAHUN 2021

Hotel P... aru, 08 Febru

ria@...n.go.id 3100 0811 - 9533

Melaka (Malaysi





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pula, izinkan saya mengapresiasi semua yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, mereka bekerja dalam senyap dan tuntas, sehingga bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memfokuskan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berbagai keberhasilan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, demi kesempurnaan penyusunan dimasa mendatang diharapkan kepada para pembaca kritik dan sarannya yang bersifat konstruktif.

Demikianlah yang dapat disampaikan, semoga Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 bermanfaat bagi pembuat kebijakan, serta sebagai bahan evaluasi didalam pencapaian target dan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Maret 2022
BUPATI BENGKALIS

KASMARNI. S.Sos. MMP



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan informasi penting dalam rangka mengevaluasi diri untuk meningkatkan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021, telah ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi 5 (lima) kategori dalam skala ordinal yaitu capaian $91\% \leq 100\%$ kategori Sangat Tinggi, $76\% \leq 90\%$ kategori Tinggi, $66\% \leq 75\%$ kategori Sedang, capaian $51\% \leq 65\%$ Kategori Rendah dan Capaian $\leq 50\%$ kategori Sangat Rendah.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, secara umum menunjukkan pencapaian sasaran kinerja dengan kategori Sangat Tinggi 76,00%, Tinggi 4%, Rendah sebesar 4% dan Sangat Rendah sebesar 12%. Tidak tercapainya sejumlah indikator kinerja disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan dilakukannya refocusing anggaran. Dari hasil analisis efisiensi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam penggunaan sumber daya disimpulkan efisien.

Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah telah melakukan penyesuaian dokumen perencanaan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, yang salah satunya



adalah dengan melakukan revisi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;

2. Realisasi atas Perjanjian Kinerja maupun Indikator Kinerja Utama tahun yang lalu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi tim anggaran untuk memberikan anggaran terhadap Perangkat Daerah terkait;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja per triwulan pada Perangkat Daerah;
4. Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat bagi seluruh Perangkat Daerah dimanfaatkan untuk memberikan pengukuran keberhasilan kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah;
5. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Zona Integritas terhadap OPD yang menangani Pelayanan Publik;
6. Membuat sistem E-SAKIP yang menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Akhir kata, Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan hidayah nya, Serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah dalam Mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri terdepan dalam penerapan, Pengembangan dan Pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai Karakteristik dan Identitas Kemelayuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.....	1
1.1.1 Keadaan Geografis	1
1.1.2 Keadaan Demografi.....	5
1.2 KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	7
1.2.1 Kewenangan.....	7
1.2.2 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	9
1.3 PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	13
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2020	19
1.5 SISTEMATIKA LAKIP TAHUN 2020	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	22
A. PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 VISI.....	22
2.2 MISI.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA.....	28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 CAPAIAN KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja.....	30
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	30
3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama	32
3.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	33
3.1.4 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis.....	36
3.2 REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP.....	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel1.1	Nama-Nama Pulau Menurut Kecamatan.....	1
Tabel1.2	Nama-Nama Sungai Menurut Kecamatan	2
Tabel1.3	Luas Daerah Menurut Kecamatan.....	3
Tabel1.4	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.....	4
Tabel1.5	Jarak Lurus Antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan ...	4
Tabel1.6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2020	5
Tabel1.7	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab.Bengkalis Tahun 2016 - 2021	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.....	28
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kab. Bengkalis Tahun 2020	32
Tabel 3.3	Tren Capaian Indikator Utama Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 - 2020	34
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Sasaran 1	36
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Sasaran 2	37
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Sasaran 3	39
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Sasaran 4	40
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Sasaran 5	42
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Sasaran 6	44
Tabel 3.10	Realisasi Indikator Sasaran 7	46

Tabel 3.11	Realisasi Indikator Sasaran 8	48
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Sasaran 9	49
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Sasaran10	51
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Sasaran 11	54
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Sasaran 12	55
Tabel 3.16	Realisasi Indikator Sasaran 13	58
Tabel 3.17	pencapaian kinerja dan tingkat efisiensi per sasaran dan anggaran tahun 2020.....	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Penurunan Tenaga Kerja.....	7
Grafik 3.1 Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	33
Grafik 3.2 Capaian Indikator IKM (%)	37
Grafik 3.3 Capaian Indikator Opini Laporan Keuangan	39
Grafik 3.4 Harapan Lama Sekolah	41
Grafik 3.5 Capaian Usia Angka Kematian Ibu	43
Grafik 3.6 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka.....	45
Grafik 3.7 Capaian Rasio Kelulusan S1/S2/S3	46
Grafik 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Migas, Non Migas dan Inflasi.....	46
Grafik 3.9 PDRB per Kapita	48
Grafik 3.10 Peningkatan PAD	48
Grafik 3.11 Capaian PMDN	50
Grafik 3.12 Capaian PMA.....	50
Grafik 3.13 Perbandingan Pendapatan Per Kapita, Indeks Gini dan Angka Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020.....	52
Grafik 3.14 Capaian NTP	54
Grafik 3.15 Capaian Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	56
Grafik 3.16 Jumlah Pelabuhan/Laut/Udara Terminal Dan Bis Yang Berfungsi Baik	57
Grafik 3.16 Capaian Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).....	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

1.1.1 Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°07'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6" - 102°30'25,2" Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 7.773,93 Km² yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1.1
Nama-Nama Pulau Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Pulau		
1.	Mandau	-		
2.	Bathin Solapan	-		
3.	Pinggir	-		
4.	Talang Muandau	-		
5.	Bukit Batu	-		
6.	Bandar Laksamana	-		
7.	Siak Kecil	-		
8.	Rupat	- P. Rupert	- P. Payung	- P. Rampang
		- P. Atung	- P. Mentele	- P. MampuKecik
		- P. MampuBeso	- P. Baru	-P.Ketam
9.	Rupat Utara	- P. Babi	- P. Beting Aceh	- P. Pajak
		- P. Kemunting	- P. Beruk	- P. Tengah
		- P. Simpur		
10.	Bengkalis	- P. Bengkalis		
11.	Bantan	-		

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka, BPS 2020

Wilayah Kabupaten Bengkalis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Letak Kabupaten Bengkalis dipandang strategis dimana dua pulaunya terletak berdekatan dengan Negara Malaysia dan Jalur Pelayaran Internasional menjadikan posisi Kabupaten Bengkalis sangat strategis. Waktu tempuh dari dua pulau yang berdekatan dengan Selat Malaka ke beberapa kota di pesisir barat Semenanjung Malaysia cukup singkat. Jarak tempuh antara Desa Tanjung Medang Ibukota Kecamatan Rupert Utara di Pulau Rupert ke Kota Port Dickson yang berjarak 48,5 km dengan waktu tempuh \pm 45 menit melalui Selat Malaka, sedangkan ke Kota Malaka yang berjarak 67 Km dari Tanjung Medang dapat ditempuh \pm 1,5 jam. Sementara jika melayari Selat Malaka dari Pelabuhan Feri yang berlokasi di Desa Selat Baru Ibukota Kecamatan Bantan Pulau Bengkalis menuju Kota Malaka yang berjarak 75 Km dapat memakan waktu \pm 1,5 jam, Kota Muar adalah kota terdekat dari Pulau Bengkalis hanya berjarak 62 Km dengan waktu tempuh pelayaran selama \pm 45 menit, sedangkan untuk mencapai Kota Batu Pahat yang berjarak 76 Km dari Pulau Bengkalis dapat ditempuh dalam waktu \pm 1 jam.

Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis berada di tepi alur Pelayaran Internasional yang paling sibuk di dunia melalui Selat Malaka, berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT), program Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle (IMS-GT) serta Dunia Melayu Dunia Islam.

Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan dan 155 desa/kelurahan. Adapun (11) sebelas kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis,

Kecamatan Rupert dan Rupert Utara terletak di Pulau Rupert, Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana dipesisir Pulau Sumatera, serta Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau yang terletak di daratan Pulau Sumatera.

Jika dirinci luas wilayah kecamatan dan dibandingkan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Talang Muandau merupakan kecamatan terluas, yaitu 1.379,26 (15,92%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rupert Utara dengan luas 378,51 Km² (4,37%). Luas serta jumlah desa/kelurahan di masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Luas Daerah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Bengkalis	Bengkalis	464,04	3	28
2	Bantan	Selat Baru	443,29	-	23
3	Bukit batu	Sungai Pakning	603,93	1	9
4	Mandau	Air Jamban	521,86	9	2
5	Rupert	Batu Panjang	1.145,19	4	12
6	Rupert Utara	Tanjung Medang	378,51	-	8
7	Siak kecil	Lubuk Muda	942,81	-	17
8	Pinggir	Pinggir	775,03	2	8
9	Bandar laksamana	Tenggayun	1.303,79	-	7
10	Bathin solapan	Sebangar	670,36	-	13
11	Talang muandau	Beringin	1.379,26	-	9
Jumlah			8.628,07	19	136

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bathin Solapan yaitu Desa Sebangar dengan jarak lurus 106 KM. Adapun jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 KM.



Tabel 1.3
Jarak Lurus Antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan

Antara Bengkulu dengan Ibukota Kecamatan			Jarak Lurus (km)
Bengkalis	Air Jamban	(Mandau)	103,00
	Sebangar	(Bathin Solapan)	106,00
	Pinggir	(Pinggir)	100,00
	Beringin	(Talang Muandau)	90,00
	Sungai Pakning	(Bukit Batu)	15,00
	Tenggayun	(Bandar Laksamana)	24,00
	Lubuk Muda	(Siak Kecil)	25,00
	Batu Panjang	(Rupat)	71,00
	Tanjung Medang	(Rupat Utara)	86,00
	Selat Baru	(Bantan)	15,00
	Bengkalis Kota	(Bengkalis)	0,00

Sumber : Kabupaten Bengkulu dalam Angka, BPS 2020

Sebagai Kabupaten Daerah perbatasan yang memiliki pulau-pulau kecil terluar, maka permasalahan pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah perbatasan, hal ini perlu mendapatkan perhatian. khusus baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Kabupaten Bengkulu mempunyai 17 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya. Selain itu wilayah Kabupaten Bengkulu juga dialiri ratusan sungai. Diantara ratusan sungai tersebut, 33 diantaranya mempunyai peran penting sebagai sarana penghubung dan nilai ekonomis lainnya. Adapun pulau-pulau dan sungai-sungai sesuai kecamatan yang dialirinya sebagaimana pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
**Jumlah Sungai, Teluk, Tanjung, Danau dan Bukit se -
Kabupaten Bengkulu**

NO.	KECAMATAN	SUNGAI	TELUK	TANJUNG	DANAU	BUKIT
1.	Bengkalis	90	-	1	-	-
2.	Bantan	55	3	2	-	-
3.	Bukit Batu	47	3	3	11	5
4.	Mandau	5	-	-	-	-
5.	Rupat	52	12	2	-	-
6.	Rupat Utara	15	7	-	-	-



7.	Siak Kecil	7	-	1	-	-
8.	Pinggir	45	-	-	17	1
Jumlah		316	25	9	28	6

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan (Hasil Inventarisasi Nama Rupabumi Kab. Bengkulu) Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bengkulu, Kecamatan yang banyak dialiri sungai adalah Kecamatan Bengkulu dengan jumlah 90 buah sungai dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Mandau dengan jumlah 5 buah sungai.

Wilayah Kabupaten Bengkulu 95% merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 2-6 m di atas permukaan laut yang ditumbuhi hutan tropis, pantainya landai dan merupakan endapan lumpur sebagai hasil dari erosi sungai. Daerah perbukitan yang tingginya tak lebih dari 55 m di atas permukaan laut hanya terletak di Duri Ibukota Kecamatan Mandau yang juga merupakan kota terbesar di Kabupaten Bengkulu.

Posisi teritorial berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah Kabupaten Bengkulu. Secara umum Kabupaten Bengkulu beriklim tropis dengan temperatur setiap tahun antara 26°C-32°C. Curah hujan rata-rata antara 651,0-1.092,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 25-63 hari/tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadinya pada bulan Februari-Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September-Januari.

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkulu tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang diantaranya membentuk Pulau Bengkulu dan Pulau Rupa.



Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuartar terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan. Secara lengkap luasan endapan dan formasi geologi tanah di Kabupaten Bengkalis tersaji pada Tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1.5

Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Bengkalis

No.	Jenis Tanah	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Endapan Permukaan Muda (lempung, lanau, kerikil licin, sisa-sisa tumbuhan, rawa gambut dan terumbu koral)	382.166,19	43,83
2.	Endapan Permukaan Tua (lempung, lanau, kerikillempungan, sisa-sisa tumbuhan dan pasir granit)	318.408,09	36,51
3.	Formasi Minas (batu lumpur lunak terkaolinkan dan terurat limonitkan, batu lanau, pasir dan kerikil)	111.554,43	12,79
4.	Formasi Pematang (batu lumpur barik ungu sampai jingga dan konglomerat breksian dan serpih coklat karbonan)	2.236,67	0,26
5.	Formasi Petani (batu lumpur kelabu karbonan terbioturbasikan, sedikit batu lanau dan batu pasir halus)	51.482,43	5,9

6.	Formasi Telisa (batu lumpur kelabu gampingan dengan batu lanau dan sedikit sisipan batu gamping, lensa batupasir)	6.059,07	0,69
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------

Sumber : Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

1.1.2 Keadaan Demografi

a. Tingkat Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis sampai dengan keadaan Desember 2021 berdasarkan data statistik kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tercatat berjumlah 624.231 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan terdiri dari 319.283 jiwa laki-laki dan 304.948 jiwa perempuan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.6

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan tahun 2021

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MANDAU	82,621	79,595	162,216
2	BATHIN SOLAPAN	54,314	51,196	105,510
3	BENGGALIS	45,320	43,826	89,146
4	PINGGIR	37,091	35,293	72,384
5	BANTAN	22,757	21,652	44,409
6	RUPAT	19,529	18,673	38,202
7	TALANG MUANDAU	15,684	14,579	30,263
8	SIK KECIL	13,525	12,981	26,506
9	BUKIT BATU	11,260	10,855	22,115
10	BANDAR LAKSAMANA	9,004	8,480	17,484
11	RUPAT UTARA	8,178	7,818	15,996
TOTAL		319,283	304,948	624,231

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.6 di atas dapat dilihat Kecamatan Mandau memiliki jumlah penduduknya paling banyak, ini juga dipengaruhi migrasi penduduk yang tak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi dan politik, sedangkan kecamatan yang memiliki populasi penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Rukat Utara.

Penduduk kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terpadat pada tahun 2021 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 516 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Bandar Laksamana merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 17 jiwa per km². Adapun tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bengkalis menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.7.



Tabel 1.7
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan		Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan per Km ² (Jiwa)
1.	MANDAU	372,25	162,216	516
2.	BATHIN SOLAPAN	811,46	105,510	130
3.	BENGKALIS	855,62	89,146	104
4.	PINGGIR	1.244,71	72,384	58
5.	BANTAN	526,62	44,409	84
6.	RUPAT	957,95	38,202	40
7.	TALANG MUANDAU	1.237,70	30,263	24
8.	SIK KECIL	1.136,31	26,506	23
9.	BUKIT BATU	378,68	22,115	58
10.	BANDAR LAKSAMANA	462,24	17,484	38
11.	RUPAT UTARA	442,93	15,996	36
Jumlah		8.628,07	624,231	72

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

b. Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Bengkulu berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Penduduk Kabupaten Bengkulu berdasarkan lapangan usaha

NO	JENIS PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	90607	80031	170638
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		139651	139651
3	PELAJAR/MAHASISWA	71580	61215	132795
4	PENSIUNAN	1490	621	2111
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3010	4141	7151
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	140	2	142
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	443	13	456
8	PERDAGANGAN	459	82	541
9	PETANI/PEKEBUN	35355	1863	37218
10	PETERNAK	36	3	39



11	NELAYAN/PERIKANAN	4286	11	4297
12	INDUSTRI	14	13	27
13	KONSTRUKSI	28	3	31
14	TRANSPORTASI	52		52
15	KARYAWAN SWASTA	27477	3651	31128
16	KARYAWAN BUMN	422	136	558
17	KARYAWAN BUMD	75	18	93
18	KARYAWAN HONORER	1989	2230	4219
19	BURUH HARIAN LEPAS	17925	255	18180
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3789	200	3989
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	479	24	503
22	BURUH PETERNAKAN	12	5	17
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	3	108	111
24	TUKANG CUKUR	40		40
25	TUKANG LISTRIK	30		30
26	TUKANG BATU	170	2	172
27	TUKANG KAYU	161	1	162
28	TUKANG SOL SEPATU	9	1	10
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	62		62
30	TUKANG JAHIT	102	93	195
31	TUKANG GIGI	3		3
32	PENATA RIAS	4	19	23
33	PENATA BUSANA		3	3
34	PENATA RAMBUT	5	13	18
35	MEKANIK	256	1	257
36	SENIMAN	13	1	14
37	TABIB	2		2
38	PERANCANG BUSANA	1		1
39	PENTERJEMAH	1	1	2
40	IMAM MASJID	53		53
41	PENDETA	115	45	160
42	PASTOR	1		1
43	WARTAWAN	44	5	49
44	USTADZ/MUBALIGH	41	1	42
45	JURU MASAK	4	3	7
46	BUPATI		1	1
47	WAKIL BUPATI	1		1
48	ANGGOTA DPRD PROP.	1	1	2
49	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	26	3	29
50	DOSEN	138	100	238
51	GURU	1256	4416	5672
52	PENGACARA	12	2	14
53	NOTARIS	4	14	18
54	ARSITEK	3		3



55	AKUNTAN		1	1
56	KONSULTAN	12	1	13
57	DOKTER	109	252	361
58	BIDAN		644	644
59	PERAWAT	84	357	441
60	APOTEKER	9	38	47
61	PSIKIATER/PSIKOLOG		1	1
62	PENYIAR RADIO	2		2
63	PELAUT	113	2	115
64	PENELITI	9	1	10
65	SOPIR	1376		1376
66	PARANORMAL	1		1
67	PEDAGANG	2417	522	2939
68	PERANGKAT DESA	151	64	215
69	KEPALA DESA	44		44
70	BIARAWAN/BIARAWATI		3	3
71	WIRASWASTA	51.551	3.500	55051
72	PEKERJAAN LAINNYA	1.176	560	1736
	JUMLAH	319.283	304.948	624.231

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

1.2 KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1 Kewenangan

Berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan konkuren kewenangan daerah terbagi atas 4 (empat), yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (enam) urusan, yang meliputi:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari 18 urusan, yang meliputi:
 - 1) Tenaga kerja;
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- 3) Pangan;
 - 4) Pertanahan;
 - 5) Lingkungan Hidup;
 - 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Perhubungan;
 - 10) Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - 12) Penanaman modal;
 - 13) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 14) Statistik;
 - 15) Persandian;
 - 16) Kebudayaan;
 - 17) Perpustakaan;
 - 18) Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan, yang meliputi:
- 1) Kelautan dan perikanan;
 - 2) Pariwisata;
 - 3) Pertanian;
 - 4) Kehutanan;
 - 5) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) Perindustrian; dan
 - 8) Transmigrasi.
- d. Penunjang Urusan terdiri dari 5 (lima) urusan, yang meliputi:
- 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kepegawaian - Diklat;
 - 4) Litbang; dan
 - 5) Fungsi lain.



1.2.2 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis, agar terwujud Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang Sejahtera Lahir dan Batin berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun dan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis diuraikan sebagai berikut:

❖ Sekretariat Daerah (Tipe A):

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, yang meliputi:

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Asisten:
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), terdiri dari:
 - Bagian Tata Pemerintahan
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum
 - Bagian Kerjasama
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), membawahi:
 - Bagian Perekonomian
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - Bagian Sumber Daya Alam
 - Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahi:



- Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- ❖ Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis (Tipe A), yang meliputi:
- Sekretaris
 - Bagian Umum
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Persidangan
 - Bagian Humas dan Protokoler
- ❖ Inspektorat Daerah (Tipe A).
- ❖ Dinas: (22 Dinas)
- 1) Dinas Pendidikan (Tipe A)
 - 2) Dinas Kesehatan (Tipe A)
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe A)
 - 4) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Tipe B)
 - 5) Dinas Pemadam Kebakaran (Tipe B)
 - 6) Dinas Sosial (Tipe A)
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe A)
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe B)
 - 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (Tipe B)
 - 10) Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B)
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A)
 - 12) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A)
 - 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B)
 - 14) Dinas Perhubungan (Tipe A)
 - 15) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Tipe A)
 - 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe A)
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe B)
 - 18) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A)
 - 19) Dinas Perikanan (Tipe B)



- 20) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (Tipe A)
- 21) Dinas Perkebunan (Tipe A)
- 22) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tipe B)
- 23) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe A)
- 24) Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A)

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi seorang Sekretaris, beberapa Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ Badan: (7 Badan)

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) (Tipe A)
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A)
- 3) Badan Pendapatan Daerah (Tipe A)
- 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan (Tipe B)
- 5) Badan Penelitian dan Pengembangan (Tipe B)
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi seorang Sekretaris dan beberapa Kepala Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) tidak diatur dalam pemetaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga pembentukan Badan tersebut tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu nomor 02 Tahun 2012 tidak mengatur tentang tipe suatu Badan, Dinas, Kantor atau Instansi Pemerintah.

❖ Rumah Sakit Umum Daerah:

Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Bengkulu yang berstatus BLUD terdiri dari 2 (dua) unit yakni:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau




Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu dipimpin oleh seorang Direktur membawahi dua orang Wakil Direktur, Satuan Pengawas Intern, Komite-Komite, Instalasi-Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional serta Staf Medik Fungsional. Sementara untuk RSUD Mandau dipimpin oleh seorang Direktur yang hanya membawahi 1 (satu) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Kepala Bidang, hal ini dikarenakan berbedanya tipe antara RSUD Bengkulu dengan RSUD Mandau, yang mana RSUD Bengkulu ber tipe (B) sedangkan RSUD Mandau tipe (C).

❖ Kecamatan:

Kabupaten Bengkulu sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, dengan adanya penambahan 3 (tiga) Kecamatan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan, sehingga jumlahnya berubah menjadi 11 (sebelas) Kecamatan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.

1. Kecamatan Bengkulu (Tipe A);
2. Kecamatan Bantan (Tipe A);
3. Kecamatan Bukit Batu (Tipe A);
4. Kecamatan Siak Kecil (Tipe A);
5. Kecamatan Mandau (Tipe A);
6. Kecamatan Pinggir (Tipe A);
7. Kecamatan Rupa (Tipe A);
8. Kecamatan Rupa Utara (Tipe A);
9. Kecamatan Talang Muandau (Tipe A);
10. Kecamatan Bathin Solapan (Tipe A);
11. Kecamatan Bandar Laksamana (Tipe A).

Pada tahun 2019 telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016. Namun,



penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016, dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 mulai diberlakukan pada awal tahun 2020.

1.3 PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI (*STRATEGIC ISSUED*)

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, namun terlepas dari berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2021 masih banyak permasalahan yang harus segera dipecahkan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, pendapatan daerah juga cukup baik namun masih berasal dari sektor-sektor tertentu saja misalnya sektor pertambangan dan penggalian yang selalu menjadi primadona Kabupaten Bengkalis, satu sisi hal ini patut disyukuri namun di sisi lain menunjukkan tingginya defisiensi daerah terhadap sektor ini. Untuk itu dibutuhkan alternatif lain guna meningkatkan sumber pembiayaan daerah di luar dana perimbangan seperti ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengidentifikasi berbagai persoalan daerah yang dijadikan fokus penyelesaian dalam tiga misi pembangunan.

Ketiga misi tersebut menggambarkan isu strategis yang menjadi sasaran pembangunan daerah, antara lain;

1. Penurunan Kemampuan Fiskal Daerah

Sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Bengkalis didominasi dari transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa Dana Bagi Hasil Minyak Bumi. Berdasarkan kondisi lifting Minyak Bumi pada empat tahun terakhir diketahui cenderung menurun baik produksi maupun harga, sehingga akan mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Bengkalis di masa mendatang.



Sementara peningkatan pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pembiayaan riil pembangunan masih belum maksimal. Untuk itu, selain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu juga dilakukan upaya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi sebagai defisit pembiayaan daerah dimasa depan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya proporsi terbesar sumber pendapatan daerah setiap tahunnya berasal dari transfer dari pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk bagi hasil yang didominasi oleh bagi hasil sumberdaya alam dari jenis bagi hasil keuntungan pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi yang berlokasi di Kecamatan Mandau dan sebagian kecilnya berada di Kecamatan Siak Kecil (perbatasan dengan Kabupaten Siak).

Menurunnya lifting minyak bumi setiap tahunnya sebagai akibat usia sumur yang semakin menua dan belum dipastikannya lagi potensi sumur-sumur baru di Kabupaten Bengkalis dan ditambah lagi dinamika global saat ini dimana nilai jual minyak bumi dunia yang semakin terpuruk akan menyebabkan situasi pendapatan daerah sebagai sumber utama pendanaan daerah juga akan mengalami penurunan.

Pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan berbagai sumber khususnya dari pajak dan retribusi rata-rata 200-300 milyar per tahun, belum mampu membiayai keseluruhan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, termasuk akan mengancam rasionalisasi belanja pegawai jika keseimbangan belanja terganggu suatu saat.

Potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah seperti perparkiran, persewaan, restoran dan termasuk kawasan pariwisata belum sepenuhnya dikelola dengan baik termasuk regulasi daerah yang belum direvisi mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

Selain itu, investasi pada badan usaha milik daerah belum menunjukkan perkembangan dalam memberikan pemasukan kepada



pendapatan daerah dari penerimaan bukan pajak dan retribusi daerah. Peluang pengembangan perusahaan umum daerah masih terkendala transformasi profesionalisme dan sumberdaya manusia yang berintegritas dalam mengelola dan mengembangkan badan usaha milik daerah tersebut.

Kemudian rencana pembangunan sejumlah pusat-pusat pertumbuhan yang dapat memberikan *multiplayer effect* bagi ekonomi sektoral di sekitarnya saat ini masih pada tahapan awal dan banyak mengalami kendala mulai dari tata ruang dan tata wilayah, alokasi penganggaran, ketersediaan lahan, perizinan hingga kesiapan prasarana pendukung pada masing-masing wilayah, sehingga peluang untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah masih belum akan terlihat pada tahun-tahun mendatang jika tidak segera dievaluasi dan difokuskan *output* dan *outcomenya*.

2. Infrastruktur

Sektor infrastruktur masih menjadi persoalan besar di Kabupaten Bengkalis mengingat luas wilayah Kabupaten Bengkalis yang relatif besar yaitu 8.628,07 Km² atau setara dengan 862.807 Ha atau sekitar 12,50 % dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luasan 107.932,71 Km² atau setara dengan 10.793.271 Ha, yang terdiri dari pulau-pulau, pesisir dan daratan. Bahkan untuk mencapai beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis harus melalui Kota Dumai seperti menuju Pulau Rupa, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau. Selain itu, masih terdapatnya ruas-ruas jalan yang berada pada wilayah operasional perusahaan dengan kondisi jalan yang rata-rata tidak dapat ditempuh oleh kendaraan pada saat musim hujan terutama di desa-desa pedalaman di Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, Rupa, Pinggir dan Talang Muandau.

Selain jalan sebagai konektivitas yang belum tuntas dibangun, konektivitas penyeberangan antar pulau khususnya ke Pulau Bengkalis dan Pulau Rupa masih bergantung kepada penyeberangan antar pulau yang memiliki batas waktu penyeberangan dan masih panjangnya waktu *loading* kendaraan, barang dan penumpang.



Penyediaan air bersih dan air minum layak juga masih menjadi tantangan yang cukup besar di Kabupaten Bengkalis khususnya di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan kawasan pemukiman pesisir di Kecamatan Bukit Batu. Demikian juga dengan pemenuhan daya listrik yang belum seimbang dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Bengkalis terutama Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain itu, kapasitas jaringan komunikasi juga masih menjadi persoalan khususnya kualitas komunikasi di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat sebagai garda terdepan perbatasan negara.

3. Pelayanan Dasar

Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur menyebabkan masyarakat tidak optimal mengakses pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, sehingga peningkatan status pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bengkalis menjadi terganggu. Pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di Kabupaten Bengkalis juga menjadi persoalan, karena akses ke pusat-pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan masih tergantung kepada kebijakan nasional terkait formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Selain itu, peningkatan status pendidikan dan kesehatan juga tergantung kepada kondisi masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar tersebut.

Kondisi kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bengkalis hampir 60% masih didominasi oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah (rentan miskin), kondisi ini menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sedangkan pada sektor kesehatan, tingkat ketergantungan masyarakat pada jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) masih relatif besar, sehingga dengan adanya kebijakan peralihan jaminan kesehatan daerah ke jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS berdampak pada kesulitan mengakses pelayanan kesehatan oleh kelompok masyarakat rentan miskin, sehingga dikhawatirkan berdampak kepada status kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.



4. Peralihan sejumlah kewenangan Kabupaten

Pelimpahan beberapa kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi dan Pusat terutama pada sektor pendidikan dan ketenagalistrikan menyebabkan melambatnya pembangunan pada bidang pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan penyediaan listrik di daerah. Ditambah adanya sejumlah peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya hibah dan bansos menyebabkan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia termasuk Kabupaten Bengkalis sangat berhati-hati dalam menyusun sejumlah kebijakan di sektor tersebut, sehingga semakin berdampak pada perkembangan pembangunan pendidikan dan ketenagalistrikan di Kabupaten Bengkalis.

5. Pemekaran wilayah administrasi di bawah Kabupaten

Meningkatnya penduduk dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru serta masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah menyebabkan pelayanan administrasi menjadi persoalan di Kabupaten Bengkalis. Sehingga, solusi jangka pendek untuk mengurangi panjangnya jalur pelayanan administrasi adalah dengan pemekaran administrasi kecamatan, desa, kelurahan dan RT/RW di sejumlah kecamatan yang kepadatan penduduknya tergolong tinggi. Bertambahnya kecamatan baru dan desa-desa baru juga memerlukan anggaran operasional yang tidak sedikit, sehingga menjadi penting untuk menyusun skala prioritas penyediaan anggaran untuk pelayanan dan sumberdaya manusianya.

6. Kemandirian Desa

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah mulai dari pusat hingga ke kabupaten/kota di Indonesia memiliki tanggung jawab bersama untuk mengupayakan dan mendorong peningkatan kualitas masyarakat desa dan pemerintahan desa tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan salah satu Nawacita Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2014 - 2020 yaitu: "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan".



Dengan demikian selain menganggarkan anggaran untuk peningkatan APB-Desa, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga harus mendorong pemberdayaan ekonomi desa, akuntabilitas pemerintahan desa dan kreatifitas masyarakat desa untuk membangun kemandirian desa dengan berbagai bentuk program pemberdayaan dan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga diharapkan ketergantungan dana desa pada bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten sedikit demi sedikit akan berkurang.

7. Peran Lembaga Adat yang Belum Optimal

Salah satu lagi dari Nawacita (Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2014 - 2020 yaitu: "Melakukan Revolusi Karakter Bangsa" yang mendorong adanya peran lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan untuk merubah secara bertahap kondisi karakter bangsa yang semakin jauh dari karakter asli ketimuran nusantara menuju karakter bangsa yang sejati.

Pentingnya lembaga adat dalam memelihara kearifan lokal dalam pembangunan dan dapat mengawal pembangunan yang berbasis revolusikarakter bangsa perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bengkalis perlu mendapatkan dukungan yang besar dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dapat menjadi mitra sejalan dalam pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Namun, dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan anggaran termasuk mekanisme hibah dan bansos dapat menyebabkan upaya ini tidak begitu optimal dan tidak akan segera nampak hasil yang diharapkan.

8. Sinergisitas Pembangunan antar Pihak

Menurunnya kapasitas fiskal anggaran Kabupaten Bengkalis perlu disikapi dengan sejumlah terobosan diantaranya: (1) meningkatkan keserasian antar program terhadap pencapaian outcome sasaran prioritas program dengan menggunakan pendekatan "*money follow priority program*" dan (2) meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha (*Public-Private Partnership*), dan



kerjasama dengan pemerintah daerah bertetangga (regional pesisir) serta kelompok masyarakat.

Namun, dua terobosan tersebut belum dikenal secara luas di Kabupaten Bengkalis, sehingga upaya ke arah dimaksud perlu segera memperkuat sektor data pembangunan dan program-program prioritas yang dapat ditawarkan kepada dunia usaha, pemerintah daerah sekitar dan kelompok-kelompok masyarakat.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan, dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu, diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil sertapertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju arah terwujudnya *good governance*, yakni Pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Esensi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Bengkalis. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diawali dengan penyusunan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholders* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menginstruksikan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh Pemangku Kepentingan (Presiden, DPRD dan Masyarakat).
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap instansi pemerintah.



1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

Dalam laporan kinerja ini disajikan sasaran strategis maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis yaitu data program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021. Strategis disini dimaksudkan bahwa program dan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan utama maupun kegiatan pendukung.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2010 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis;



b. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Kabupaten Bengkalis yang ingin diwujudkan pada periode akhir perencanaan pembangunan jangka menengah 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI
MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”**

Penelaahan terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-pokok visi dengan penjelasan sebagai berikut :

Model Negeri	Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.
Maju	Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi periode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan

	percepatan pengembangan kawasan.
Makmur	Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

2.2. MISI

Visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 yang dirumuskan dalam misinya adalah sebagai berikut:

***Misi Pertama** : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.*

***Misi Kedua** : Mewujudkan pengelolaan seluruh potensidaerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.*

***Misi Ketiga** :Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.*


3. Tujuan dan Sasaran

Adapun rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 seperti Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan dan Bertanggung Jawab Serta dapat Melaksanakan Kepemimpinan dengan Bijak, Berani dan Ikhlas	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 3. EKPPD (Evaluasi kinerja pemerintah daerah) 4. Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
2.	Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat	2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3. Laju pertumbuhan ekonomi 4. PDRB perkapita	4. Meningkatnya kualitas pendidikan 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 6. Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja 7. Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	5. Rata-rata lama sekolah 6. Harapan lama sekolah 7. Angka Harapan Hidup (AHH) 8. Angka Kematian Ibu (AKI) 9. Status Gizi Balita 10. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 11. Rasio Lulusan S1/S2/S3 12. pertumbuhan ekonomi: - Tanpa migas - Dengan migas 13. Laju inflasi kumulatif 14. Persentase peningkatan PAD 15. PDRB perkapita (ADHB(RP.juta))

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				8. Meningkatnya nilai investasi	16. Nilai Investasi Daerah: - PMDN (Rp. Juta) - PMA (USD Ribu)
		4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	5. Angka Kemiskinan	9. Meningkatnya taraf hidup masyarakat	17. Pendapatan Perkapita 18. Indeks Gini 19. Angka kemiskinan 20. Nilai tukar petani (Pertanian, perkebunan, perikanan)
		5. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	11. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3.	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat	6. Meningkatkan aksesibilitas daerah	7. Indeks kemahalan konstruksi	12. Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	22. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 23. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis yang berfungsi baik 24. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyebrangan
		7. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman	8. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	13. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum	25. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)



Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen dan amanah antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bengkalis tahun 2021 mengacu pada Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, dan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021, serta Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :



Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	80
2.	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	2. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	BB (70)
		3. EKPPD (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah)	ST
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah	4. Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan	5. Rata-rata lama sekolah	9
		6. Harapan lama sekolah	12,93
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,2
		8. Angka Kematian Ibu (AKI)	110
		9. Status Gizi Balita	BAIK (92)
6.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,15
		11. Rasio lulusan S1/S2/S3	33,05
7.	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	12. Pertumbuhan Ekonomi :	
		- Tanpa migas	7,05
		- Dengan migas	2,68
		13. Laju inflasi kumulatif	4,35
		14. Persentase peningkatan PAD	4,60
15. PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.juta)	357,24		
8.	Meningkatnya nilai investasi	16. Nilai Investasi Daerah:	
		- PMDN (Rp. Juta)	1.105.000
		- PMA (USD Ribu)	34,485



9.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	17.	Pendapatan Perkapita	11.350,00
		18.	Indeks Gini	0,225
		19.	Angka kemiskinan (%)	6,15
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	20.	Nilai tukar petani (Pertanian, perkebunan, perikanan)	95
11.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75
12.	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	22.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	65,79
		23.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis yang berfungsi baik	96
		24.	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan penyebrangan	230,236
13.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Utilitas Umum	25.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	30



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Di dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini dapat diperoleh informasi tentang capaian kinerja dari sasaran strategis yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, yang merupakan target kinerja jangka pendek (tahunan) yang harus dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sebagai dokumen pertanggungjawaban yang mengungkap keberhasilan maupun kegagalan, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi umpan balik untuk membantu penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD atau Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Proses awal pengukuran kinerja adalah pengumpulan data kinerja dari setiap target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian Indikator Kinerja Sasaran.

Predikat ini capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal yang tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase Indikator Kinerja Sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang di harapkan.

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

b. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dan Indikator Kinerja Utama tersebut terakhir telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi IKU	Capaian	Kode
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	80	88,17	110,21	
2.	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	2. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	BB (70)	B (66,26)	Belum Tercapai (94,65)	
		3. EKPPD (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah)	ST	ST	Tercapai (100)	
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah	4. Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Tercapai (100)	
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan	5. Rata-rata lama sekolah	9	9,70	107,67	
		6. Harapan lama sekolah	12,93	12,87	99,54	
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,2	71,2	100	
		8. Angka Kematian Ibu (AKI)	110	189	58,20	
		9. Status Gizi Balita	BAIK (92)	BAIK (82,50)	BAIK (88,71)	
6.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,15	6,63	122,98	
		11. Rasio lulusan S1/S2/S3	33,05	42,57	128,80	
7.	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	12. Pertumbuhan Ekonomi :				
		- Tanpa migas	7,05	-0,02	-0,28	
		- Dengan migas	2,68	-3,30	-123,13	
		13. Laju inflasi kumulatif	4,35	1,66	262,05	
		14. Persentase peningkatan PAD	4,60	-0,185	-4,02	
15. PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.juta)	357,24	127,460	35,68			

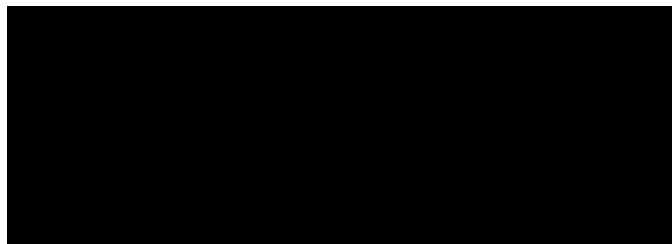
8.	Meningkatnya nilai investasi	16.	Nilai Investasi Daerah:				
			- PMDN (Rp. Juta)	1.105.000	5.319.264	481,38	
			- PMA (USD Ribu)	34,485	30.411	88,186	
9.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	17.	Pendapatan Perkapita	11.350,00	14.207,00	124,08	
		18.	Indeks Gini	0,225	0,327	68,81	
		19.	Angka kemiskinan (%)	6,15	6,64	92,62	
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	20.	Nilai tukar petani (Pertanian, perkebunan, perikanan)	95	140,32	147,71	
11.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	70,55	94,07	
12.	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	22.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	65,79	61,96	94,18	
		23.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis yang berfungsi baik	96	99	103,125	
		24.	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan penyebrangan	230,236	915,258	397,530	
13.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Utilitas Umum	25.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	30	107,53	358,43	

Sumber : Hasil data olahan

3.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bengkalis pada RPJMD tahun 2016-2021 sebanyak 13 (tiga belas) sasaran. Dari 13 (tiga belas) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 25 (dua puluhlima), pencapaian kinerja sasaran pemerintah Kabupaten Bengkalis seperti yang tersaji pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021



Berdasarkan Gambar di atas dapat dijelaskan, Bahwa secara umum Indikator Kinerja Utama tahun 2021 sebagian besar dapat dicapai dengan kategori **Sangat Tinggi** (80,00%). Indikator Kinerja Utama dengan capaian tertinggi adalah pada indikator Nilai Investasi Daerah (481,38%), Sedangkan Capaian Terendah pada Indikator Pertumbuhan Ekonomi (-0,28%), hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan sektor migas secara signifikan dan lumpuhnya ekonomi real masyarakat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.

Trend pencapaian Indikator Kinerja Utama selama tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Trend Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian indikator (%)			Status Keberhasilan Sasaran Tahun 2021				
			2019	2020	2021	≤ 50	51 ≤ 65	66 ≤ 75	76 ≤ 90	91 ≤ 100
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	112,76	110,01	110,21					
2.	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	2. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai					
		3. EKPPD (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah)	Tercapai	Tercapai	Tercapai (100)					
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah	4. Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapai	Tercapai	Tercapai (100)					
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan	5. Rata-rata lama sekolah	105,26	108,03	107,67					
		6. Harapan lama sekolah	100,86	99,54	99,54					
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7. Angka Harapan Hidup (AHH)	101,52	100,14	100					
		8. Angka Kematian Ibu (AKI)	91,60	57,21	58,20					
		9. Status Gizi Balita	-	BAIK	BAIK					
6.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	91,58	92,91	122,98					
		11. Rasio lulusan S1/S2/S3	158,17	151,30	128,80					

7.	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	12.	Pertumbuhan Ekonomi :										
			- Tanpa migas	26,90	-0,29	-0,28							
		- Dengan migas	-98,77	-160,98	-123,13								
		13.	Laju inflasi komulatif	256,73	307,03	262,05							
		14.	Persentase peningkatan PAD	60,13	-110,5	-4,02							
15.	PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.juta)	75,93	59,03	35,68									
8.	Meningkatnya nilai investasi	16.	Nilai Investasi Daerah:										
			- PMDN (Rp. Juta)	546,81	545,42	481,38							
			- PMA (USD Ribu)	494,72	11,86	88,186							
9.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	17.	Pendapatan Perkapita	104,70	103,55	124,08							
		18.	Indeks Gini	142,24	139,57	68,81							
		19.	Angka kemiskinan (%)	109,25	101,56	92,62							
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	20.	Nilai tukar petani (Pertanian, perkebunan, perikanan)	-	125,02	147,71							
11.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,47	94,23	94,07							
12.	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	22.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	80,43	82,82	94,18							
		23.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis yang berfungsi baik	107,8	104,26	103,125							
		24.	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan penyebrangan	-	364,81	397,530							
13.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Utilitas Umum	25.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	151,60	185,81	358,43							
JUMLAH				139,77	122,42	132,12							

Sumber : Hasil data olahan

3.1.4 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

MISI I MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB SERTA DAPAT MELAKSANAKAN KEPEMIMPINAN DENGAN BIJAK, BERANI DAN IKHLAS

Sasaran 1:

“Meningkatnya Pelayanan Publik”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan persentase capaian dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 110,21% sesuai Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Realisasi Indikator Sasaran 1

No	Indikator	Satuan	Data Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	50	69,47	84,33	84,29	86,69	80	88,17	110,21	80	110,21
Rata-rata Capaian										110,21		

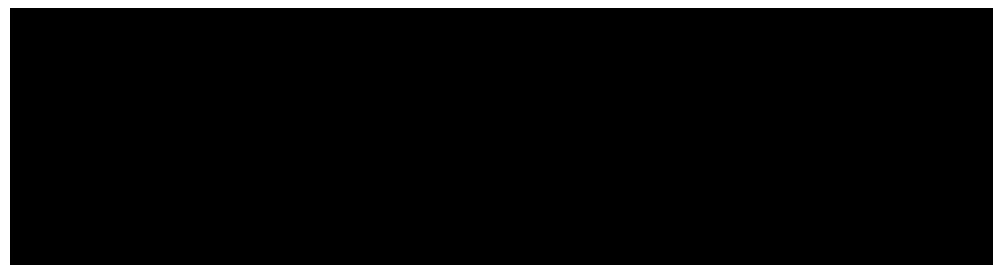
Sumber: Bagian Organisasi Setda (Data Olahan)

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi dari indikator kinerja tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan, dengan realisasi 88,17% dari target sebesar 80% dengancapaian sebesar 110,21%, sehingga telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD 2016-2021.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka perangkat daerah telah membuat dan menerapkan SOP untuk pelayanan publik, sehingga memacu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik seperti: pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu kuning) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Grafik 3.2
Capaian Indikator IKM (%)



Sasaran 2:

“Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja bahwa untuk indikator EKPPD dapat dicapai dengan status Sangat Tinggi (ST), sedangkan untuk indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu tidak tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Meskipun Indikator Akuntabilitas Kinerja tidak tercapai, namun nilainya meningkat dari 65,79 menjadi 66,26 dengan predikat B dan tergolong dalam kategori baik (Tabel 3.5).

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Sasaran 2

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kab. Bengkulu	Predikat	CC	B	B	B	B	BB	B	Belum Tercapai	BB	Belum Tercapai
2.	EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Status Kinerja	T	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Tercapai	ST	Tercapai

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Pemerintahan Setda Kab. Bengkulu tahun 2021

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

1. Adanya keselarasan antara dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, yaitu RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD serta meningkatnya pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

2. Penetapan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyusunan dokumen SAKIP, telah memudahkan dalam proses penyusunan SAKIP.

Faktor Permasalahan antara lain:

Predikat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum tercapai disebabkan:

1. Peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum signifikan;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dijadikan dasar penilaian kinerja dan belum dilakukan monitoring berkala atas capaian target kinerja;
3. Belum memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan SAKIP (e-SAKIP) dan belum melaksanakan Reformasi Birokrasi, membangun kawasan Zona Integritas WBK WBBM, dan peningkatan inovasi dalam manajemen kinerja.

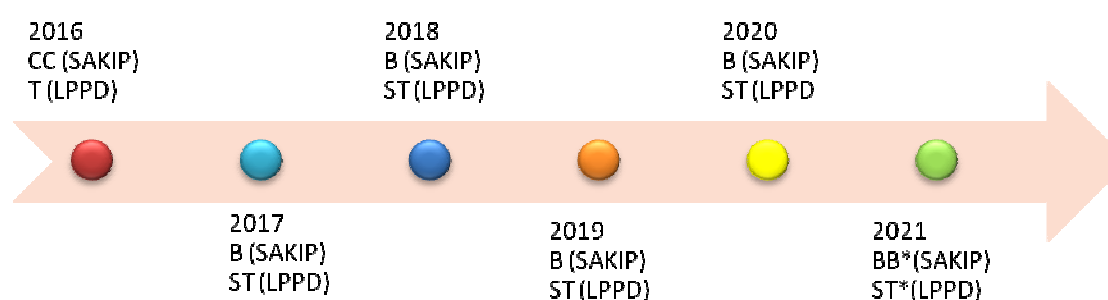
Solusi/pemecahan masalah:

1. Membangun kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan peningkatan inovasi dalam manajemen kinerja;
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Memperoleh nilai 66,26 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum signifikan dan masih perlu untuk disempurnakan;
4. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
5. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih



- berorientasi pada urusan sehingga belum terlihat hubungan lintas fungsi antar PD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja secara menyeluruh;
6. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada PD, sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja dan belum sepenuhnya terlihat adanya keterlibatan pimpinan PD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan.

Gambar 3.1
Capaian Indikator LAKIP dan



LPPD

Pada Gambar 3.1 di atas menggambarkan target dan pencapaian SAKIP dan EKPPD dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

Sasaran 3:

“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja bahwa opini laporan keuangan dapat dicapai dengan opini WTP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Sasaran 3

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	WTP	Tercapai
Rata-rata Capaian										Tercapai		

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bengkalis 2021

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

1. Semakin meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Semakin ketatnya pengawasan dan evaluasi, baik oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah maupun Pengawas Eksternal.

Grafik 3.3

Capaian Indikator Opini laporan Keuangan



MISI II MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SELURUH POTENSI DAERAH DAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

Sasaran 4 :

“Meningkatnya Kualitas Pendidikan”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian sebesar 103,60% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 di bawah dapat diketahui bahwa realisasi dari 2 (dua) indikator kinerja selama 2019-2021 menunjukkan kenaikan capaian indikator kinerja dan secara keseluruhan tahun 2021 rata-rata capaiannya sebesar 103,60%.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Sasaran 4

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,83	8,85	9,21	8,85	9,69	9	9,70	107,78	9	107,78
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,8	12,8	12,66	12,8	12,87	12,93	12,87*	99,54	12,93	99,54
Rata - Rata Capaian										103,66		

Sumber: - BPS Tahun 2021 (diolah)
- (*) angka sementara

Faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Rata-rata lama sekolah

Realisasi indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2021 mencapai 9,70 atau 107,78%, jika dibandingkan target akhir RPJMD 2021 sebesar 103,60% sudah mencapai target yang ditetapkan. Tingkat keberhasilan ini didukung oleh:

- a. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dengan dukungan program Pemerintah yang menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Semakin baiknya kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dapat mendukung masa pendidikan bagi setiap peserta didik di setiap jenjang pendidikan;
- c. Meningkatnya kompetensi dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan diseluruh wilayah Kabupaten Bengkalis;
- d. Adanya jaminan pendidikan yang bebas biaya dari tingkat SD sampai SLTA;
- e. Adanya program beasiswa pendidikan dari pemerintah maupun swasta, bagi siswa yang berprestasi, kurang mampu dan suku terasing.

Faktor permasalahan antara lain:

1. Harapan lama sekolah

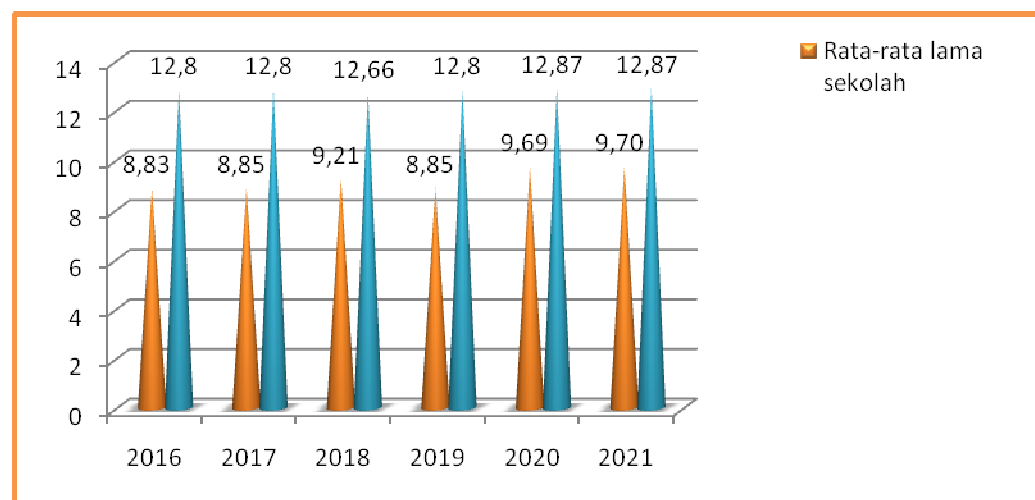
Realisasi indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,87 atau 99,54%, jika dibandingkan target akhir RPJMD 2021 sebesar 12,93 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Adanya pandemi Covid-19 telah menghambat proses belajar mengajar secara tatap muka, sehingga pemberian motivasi dan informasi dari sekolah terbatas;
- b. Tebatasnya sosialisasi dari pihak perguruan tinggi ditahun 2021 tentang keunggulan kampus mereka, yang bisa dilakukan hanya melalui daring, dan media masa, tidak bisa melakukakn tatap muka di karenakan pandemi Covid-19;
- c. Kurang motifasi dari orang tua ke anak untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;
- d. Kurangnya minat bagi anak yang lulus jenjang SLTA di tahun 2021 untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dimasa Covid-19, karena kuliah dilakukan secara daring.



Grafik 3.4

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah



Sasaran 5 :

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”


Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan persentase capaian dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 82,30% dengan predikat **Tinggi**.

Tabel 3.8

Realisasi Indikator Sasaran 5

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Angka Harapan Hidup	Nilai	70,65	70,95	70,85	70,85	71,2	71,2	71,2	100	71,2	100
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KLH	187	130	116	131	201	110	189	58,20	110	58,20
3.	Status Gizi Balita	Nilai	-	-	98	98	Baik (86,56)	Baik (93)	Baik (82,50)	Baik (88,71)	Baik (93)	88,71
Rata - Rata Capaian										82,30		

Sumber:- Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2021
- Bengkalis Dalam Angka, BPS 2021



Berdasarkan Tabel 3.8 di atas hasil capaian pada tahun 2021 pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat menunjukkan capaian satu indikator berhasil yaitu Angka Harapan Hidup dengan capaian 100%, sedangkan dua indikator lainnya belum berhasil yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Status Gizi Balita dengan capaian masing-masing 58,20% dan 88,71%.

Faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh 2 (dua) faktor keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, yaitu:

- a. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- b. Meningkatnya pemerataan dan jaminan pelayanan serta promosi kesehatan dan rujukan.

Faktor permasalahan antara lain:

1. Angka Kematian Ibu

Angka kasus kematian Ibu di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 masih belum mencapai target yang telah ditentukan disebabkan:

- a. Belum optimalnya sistem rujukan dan masih adanya penanganan persalinan tidak dilakukan di puskesmas atau rumah sakit;
- b. Belum optimalnya kualitas Pelaksanaan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) pada 18 Puskesmas;
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan *antenatal care* (ANC) untuk ibu hamil trimester III dalam deteksi dini komplikasi ibu hamil dan melahirkan;

2. Status Gizi Balita

Angka Status Gizi Balita di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 meskipun belum tercapai target yang telah ditetapkan, namun capaiannya masih dalam kategori baik. Belum tercapainya target ini disebabkan:

a. Ekonomi

Adanya pandemi covid-19 selama dua tahun terakhir menyebabkan lumpuhnya beberapa sektor perekonomian sehingga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan pokok balita terbatas.

b. Sanitasi



Belum seluruh masyarakat memiliki akses sanitasi yang layak dan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) serta sarana pembuangan air limbah rumah tangga yang buruk dan belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

c. Pendidikan orang tua

Pengetahuan orangtua tentang bahan makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada balita masih kurang.

d. Perilaku orang tua

Berubahnya perilaku orangtua dari kebiasaan memberikan ASI dengan susu formula pada balita.

Solusi/pemecahan masalah:

1. Angka Kematian Ibu

a. Peningkatan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada 18 Puskesmas sesuai SOP.

b. Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care (ANC) untuk ibu hamil trisemester III dalam deteksi dini komplikasi ibu hamil dan melahirkan.

2. Status Gizi Balita

a. Memberikan stimulus pemulihan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok balita.

b. Meningkatkan pelayanan akses air bersih dan sanitasi yang sehat serta sarana pembuangan air limbah rumah tangga.

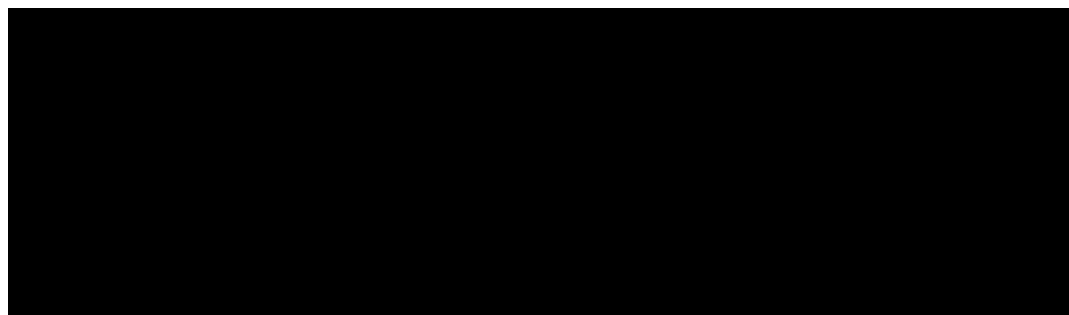
c. Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang bahan makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada balita.

d. Memberikan pengetahuan tentang manfaat ASI bagi balita.

e. Peningkatan penyelenggaraan 8 Aksi Konvergensi untuk pencegahan dan penurunan stunting.

Grafik 3.5

Capaian Usia Angka Kematian Ibu



Sasaran 6 :**“Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja”**

Berdasarkan Tabel 3.9 diketahui bahwa pada tahun 2021 pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja sebesar 125,87%, dengan demikian predikat capaian indikator ini **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.9
Realisasi Indikator Sasaran 6

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,80	7,15	7,83	9,28	9,31**	8,15	6,63	122,98	8,15	122,98
2.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Tanpa satuan	22,15	23	28,45	47,53	48,34	33,05	42,57	128,80	33,05	128,80
Rata - Rata Capaian									125,87			

Sumber: -BPS Tahun 2021 (diolah)
- Disdukcapil Kabupaten Bengkalis 2021 (diolah)

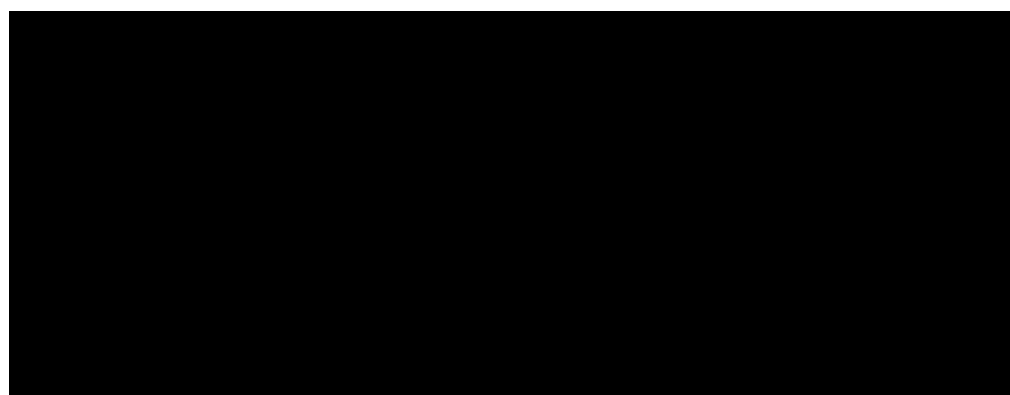
Berdasarkan Tabel 3.9 di atas diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah melebihi target yang ditetapkan, demikian pula untuk indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 125,87%. Dengan demikian telah melebihi target akhir RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

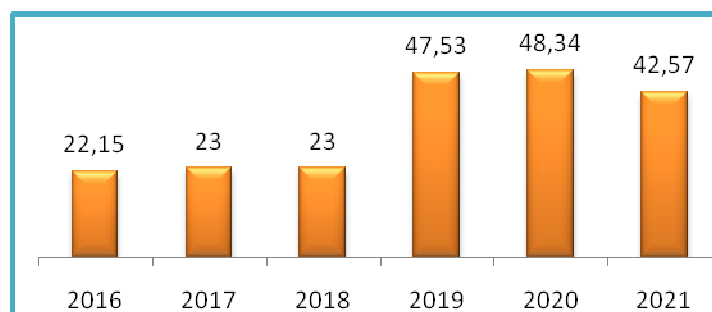
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - a. Proses peralihan kontrak tenaga kerja antara PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT. Pertamina Hulu Rokan pada Bulan September hingga Oktober 2021 telah membuka lapangan kerja sebesar 13.095 orang, sehingga secara signifikan telah menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
 - b. Tumbuhnya usaha ekonomi di sektor riil, seperti kuliner telah secara nyata membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka;

- c. Adanya Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penempatan Tenaga Kerja telah membantu secara signifikan dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis.
2. Rasio lulusan S1/S2/S3
- a. Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
 - b. Semakin mudahnya akses untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena jumlah perguruan tinggi semakin bertambah di ibukota provinsi maupun di kabupaten;
 - c. Adanya program beasiswa pendidikan dari pemerintah dan swasta, bagi siswa yang berprestasi, kurang mampu dan bagi suku terasing;
 - d. Adanya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan riil seperti pemberian beasiswa pendidikan dari pemerintah, bagi siswa yang berprestasi, kurang mampu dan bagi suku terasing;
 - e. Selain program beasiswa pendidikan dari pemerintah juga ada dukungan dari pihak swasta terkait pemberian beasiswa ini;
 - f. Semakin membaiknya ekonomi masyarakat.

Grafik 3.6
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka



Grafik 3.7
Capaian Rasio Kelulusan S1/S2/S3



Sasaran 7 :

“Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja bahwa persentase capaian sebesar 34,06%. Ini berarti secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran belum tercapai dan dari empat indikator kinerja hanya satu indikator kinerja yang targetnya tercapai yaitu laju inflasi kumulatif (Tabel 3.10).

Tabel 3.10
Realisasi Indikator Sasaran 7

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Pertumbuhan ekonomi	%										
	- Tanpa migas		3,28	3,85	3,85	1,77*	-0,02	7,05	-0,02	-0,28	7,05	-0,28
	- Dengan Migas		-2,44	-1,98	1,94	-1,62*	-3,30	2,68	-3,30	-123,13	2,68	-123,13
2.	PDRB Perkapita (Juta)	Rp	146,20	160,5	309,99	235,80*	248,60	357,240	127,460	35,68	357,24	35,679
3.	Laju inflasi kumulatif	%	4,18	4,25	6,05	2,45	2,36	4,35	1,66	262,05	4,35	262,05
4.	Persentase peningkatan PAD	%	24,96	-27,66	2,73	2,73*	-5,05	4,60	-0,185	-4,02	4,60	-4,02
Rata – Rata Capaian									34,06			

Sumber: BPS Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi dari 4 (empat) indikator kinerja tahun 2021 sebesar 34,06%, dan menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 18,86%. Namun demikian kondisi ini masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Dari 4 (empat) indikator di atas hanya satu indikator yang mencapai target yang ditetapkan yaitu indikator Laju Inflasi Kumulatif, dengan realisasi sebesar 1,66% kondisi ini sudah mencapai target sebesar 4,35%. Capaian tersebut sudah melebihi target akhir RPJMD 2016-2021 dengan tingkat capaian sebesar 262,05%. Kondisi tersebut menunjukkan *trend* positif terkait harga pengeluaran belanja terhadap produk serta ketersediaan bahan makan dan bahan bukan makanan relatif stabil.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

Capaian Indikator Laju Inflasi Kumulatif

- a. Adanya insentif pajak daerah dan retribusi, seperti penghapusan denda pajak dan pengurangan tarif pajak PBB-P2.
- b. Adanya program insentif pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dimasa pandemi Covid-19, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari sumber dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Bengkalis dan dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- c. Adanya Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting telah membantu secara signifikan menurunkan tingkat inflasi.

Faktor permasalahan antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi

a. Tanpa Migas

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebesar -0,02% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 7,05%, kondisi ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang secara nyata telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di sektor riil menurun secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan kondisi nasional dan global.

b. Dengan Migas

Indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas tahun 2021, realisasinya sebesar -3,30% masih jauh dari target sebesar 2,68%. Kondisi ini disebabkan selain



menurunnya produksi migas di Kabupaten Bengkalis juga adanya pandemi Covid-19.

2. Capaian Indikator PDRB Perkapita (Juta)

Indikator PDRB Perkapita tahun 2021, realisasinya sebesar Rp. 127.460,00 masih jauh dari target sebesar Rp. 357.240,00. Kondisi tersebut disebabkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis masih sangat tergantung pada sektor migas. Pada tahun 2021 sub sektor pertambangan seperti minyak dan gas masih mendominasi penyumbang PDRB jika dibandingkan dengan aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya. Pertumbuhan PDRB atau lebih dikenal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tidak dapat sepenuhnya menggantungkan pola pertumbuhan ekonomi makronya hanya dari pertumbuhan sektor migas, mengingat dalam kurun 3 Tahun terakhir telah terjadi trend penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun, harus lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya non migas untuk memacu pertumbuhan ekonomi makro di Kabupaten Bengkalis.

3. Capaian indikator pendapatan asli daerah yang saat ini mengalami perlambatan disebabkan oleh:

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak dan retribusi;
- b. Belum optimalnya penerimaan pajak/retribusi daerah yang saat ini dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh data base yang belum akurat, peraturan daerah yang belum disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. Masih banyaknya tunggakan pajak/retribusi, disebabkan tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi rendah, serta penegakan peraturan daerah tentang pajak/retribusi yang belum optimal;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi perpajakan oleh wajib pajak/retribusi.

Target realisasi anggaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021:

Meskipun sasaran kinerja Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah secara umum belum tercapai, namun realisasi pendapatan APBD Kabupaten Bengkalis mendapat predikat terbaik 1 se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terkait realisasi pendapatan APBD ini, telah membawa Kabupten Bengkalis mendapat penghargaan realisasi

pendapatan APBD Kabupaten/Kota terbaik 1 se-Indonesia tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

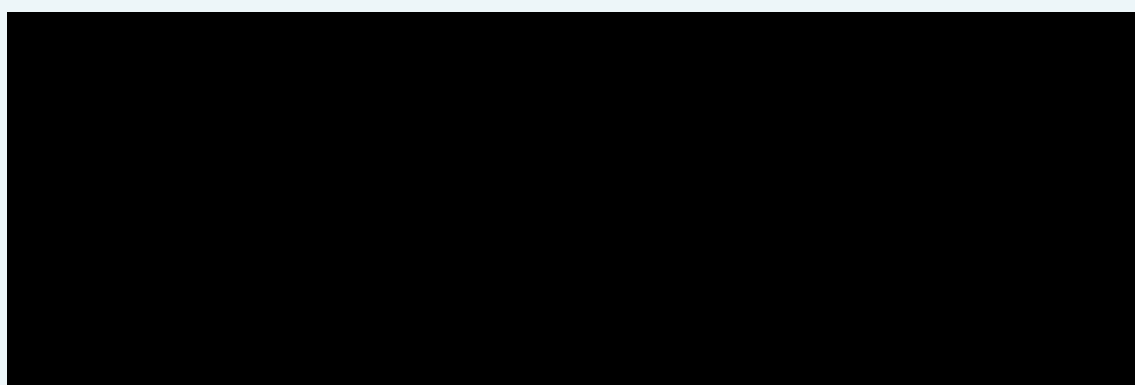
Target dan realisasi APBD Kabupaten Bengkalis selama periode RPJMD tahun 2016-2021, sebagai berikut:

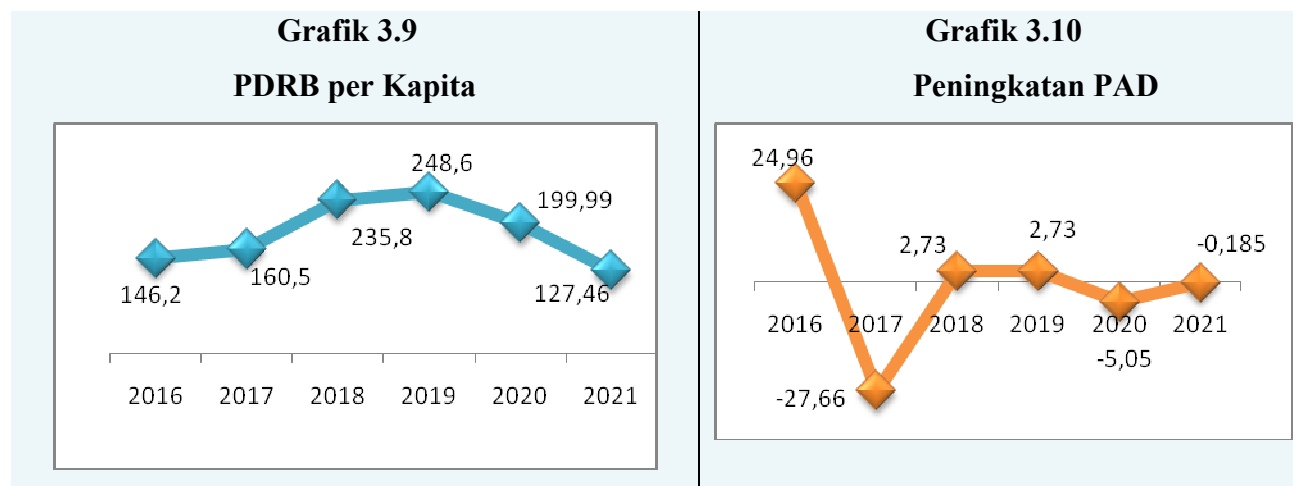
Tabel 3.11
Target dan Realisasi APBD Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pendapatan Daerah	4.266.632.445,538	3.357.706.476.487,95	3.970.191.749.095,21	3.141.306.557.625,56	3.499.895.466.577,00	3.390.135.993.331,46	3.901.482.457.873,00	4.005.405.574.387,69	2.937.425.678.887,83	3.840.815.814.685,02	3.443.486.942.468,00	5.111.112.491.549,72

Grafik 3.8

Pertumbuhan Ekonomi Migas, Non Migas, dan Laju Inflasi





Solusi/pemecahan masalah:

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang tidak tergantung sepenuhnya pada produksi migas;
2. Peningkatan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk diproses lebih lanjut, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha/industri;
4. Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mampu mendorong tewujudnya iklim investasi yang kondusif.

Sasaran 8 :

“Meningkatnya Nilai Investasi”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 1 (indikator) indikator kinerja bahwa persentase capaian sebesar **284.78%** telah melebihi target yang ditetapkan dengan predikat **Sangat Tinggi** (Tabel 3.12).

Tabel 3.12
Realisasi Indikator Sasaran 8

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Nilai Investasi Daerah:												
	- PMDN (Rp. Juta)	Rp.	619.403	505.000.000.000	420.355.900.000	4.401.854,2	5.208.743,2	1.105,00	5.319.264,2	481,38	1.105,00	481,38	
	- PMA (USD Ribu)	USD.	3.380	27.285.000	29.085.000	152.795,3	3.876	34,485	30.411	88,19	34.485	88,19	
Rata - Rata Capaian												284,78	

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 (Data Diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3.12 di atas dapat diketahui bahwa peningkatan iklim investasi mengalami kenaikan sangat signifikan yang ditunjukkan dari minat investor berdasarkan dari nilai investasi di Kabupaten Bengkalis selama 2021 menunjukkan *trend* yang meningkat dibandingkan pada tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai Investasi Daerah

- PMDN

Realisasi dari indikator ini sudah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.5.319.264.200.000,00 (lima triliun tiga ratus sembilan belas milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari target sebesar Rp.1.105.000.000.000,00 atau sebesar 481,38%.

- PMA

Realisasi dari indikator ini kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar USD.30.411.000,00 (tiga puluh juta empat ratus sebelas ribu USD) dari target sebesar USD.34.485.000,00 atau sebesar 88,19%.

Faktor keberhasilan antara lain:

1. Semakin mudah dan singkatnya pengurusan perizinan di Kabupaten Bengkalis sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkalis;
2. Tercapainya program promosi dan investasi di daerah dalam mempromosikan potensi unggulan di Kabupaten Bengkalis;
3. Iklim dunia usaha yang kondusif dan didukung oleh stabilitas keamanan dan politik yang baik di Kabupaten Bengkalis;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal, telah secara signifikan membantu meningkatkan investasi di Kabupaten Bengkalis.

Faktor permasalahan antara lain:

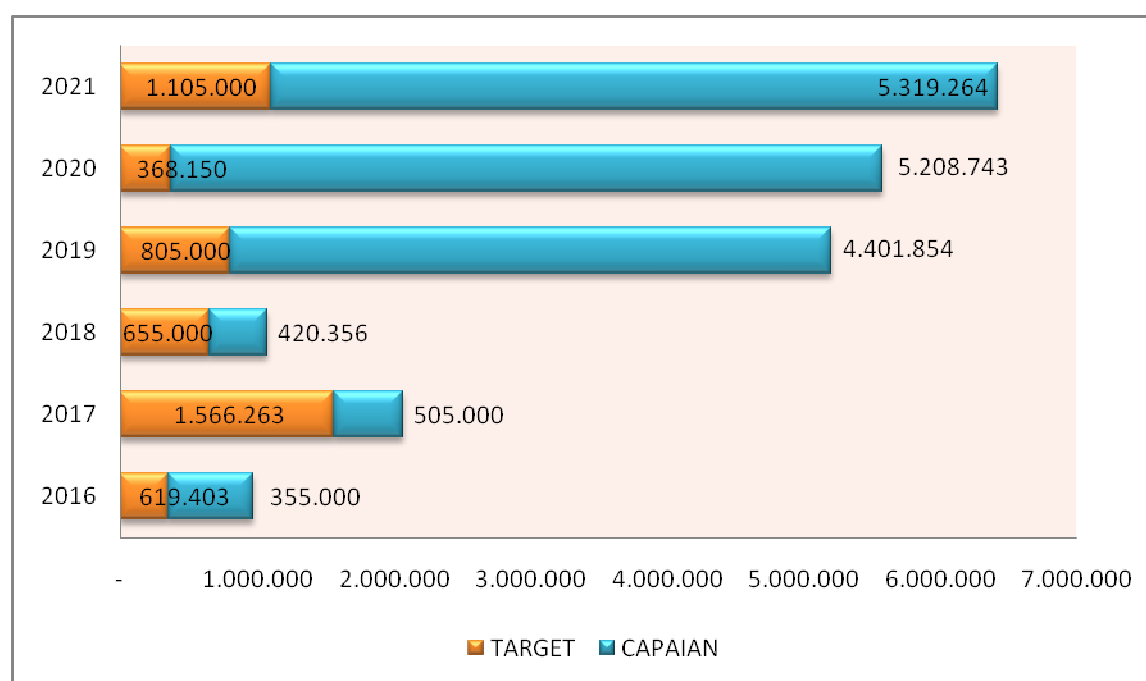
1. Masih banyaknya perusahaan yang tidak mengetahui tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) On Line;
2. Adanya perubahan kepemilikan manajemen dari PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT. Pertamina Hulu Rokan, sehingga mempengaruhi progres dari tingkat investasi PMA;

- Adanya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi tingkat capaian nilai penanaman modal asing (PMA), baik secara lokal, regional dan nasional.

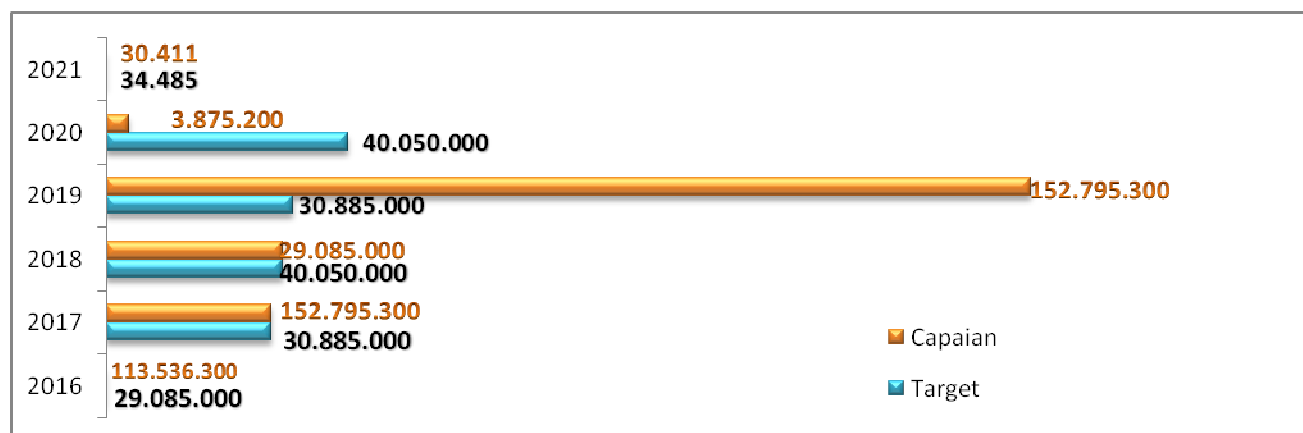
Rekomendasi:

- Menawarkan peluang atau potensi lainnya yang mampu menarik investasi asing seperti potensi pariwisata di Pulau Rupat dan budidaya tambak udang di Pulau Rupat, Bengkulu dan wilayah pesisir sumatera lainnya di Kabupaten Bengkulu;
- Meningkatkan promosi peluang usaha dan potensi kepada investor asing baik melalui media cetak, elektronik yang berskala nasional maupun internasional;
- Mempermudah persyaratan dan proses perizinan bagi pelaku usaha / investor guna meningkatkan iklim investasi;
- Meningkatkan sosialisasi kepatuhan PMA & PMDN untuk melaporkan kegiatan perusahaan secara berkala dan diberikan sanksi bagi perusahaan yang belum melaporkan kegiatan penanaman modal ke LKPM Online.

Grafik 3.11
Capaian PMDN



Grafik 3.12
Capaian PMA



Sasaran 9 :

“Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai target yang di tetapkan dengan rata – rata capaian sebesar 95,17% (Tabel 3.13).

Tabel 3.13
Realisasi Indikator Sasaran 9

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Pendapatan Perkapita	Rp. Ribu/Tahun	11.325	11.500,75	11.790,55	11.753	11.753	11.450,00	14.207,00*	124,08	11.450,00	124,08
2	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,245	0,248	0,263	0,33	0,321	0,225	0,327	68,81	0,225	68,81
3	Angka kemiskinan	%	6,82	6,85	6,22	6,27	6,4	6,15	6,64	92,62	6,15	92,62
Rata - Rata Capaian										95,17		

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, BPS 2021 (diolah)
Ket: (*) angka sementara

Berdasarkan data pada Tabel 3.13 di atas dapat diketahui bahwa realisasi dari 3 (tiga) indikator kinerja tahun 2021 menunjukkan belum mencapai target, yaitu dengan capaian

rata-rata sebesar 95,17% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja.

1. Pendapatan Perkapita

Realisasi dari indikator ini telah mencapai target dimana target yang terealisasi sebesar Rp.14.207.000,00 dengan hasil capaian sebesar 124,08 % dari target Rp.11.450.000,00 yang ditetapkan.

2. Indeks Gini

Realisasi indikator Indeks Gini belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan realisasinya lebih tinggi dibandingkan dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,327% dari target 0,225%, meskipun demikian angka ini masih dikategorikan belum terjadi ketimpangan kesejahteraan di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Bengkalis.

3. Angka kemiskinan

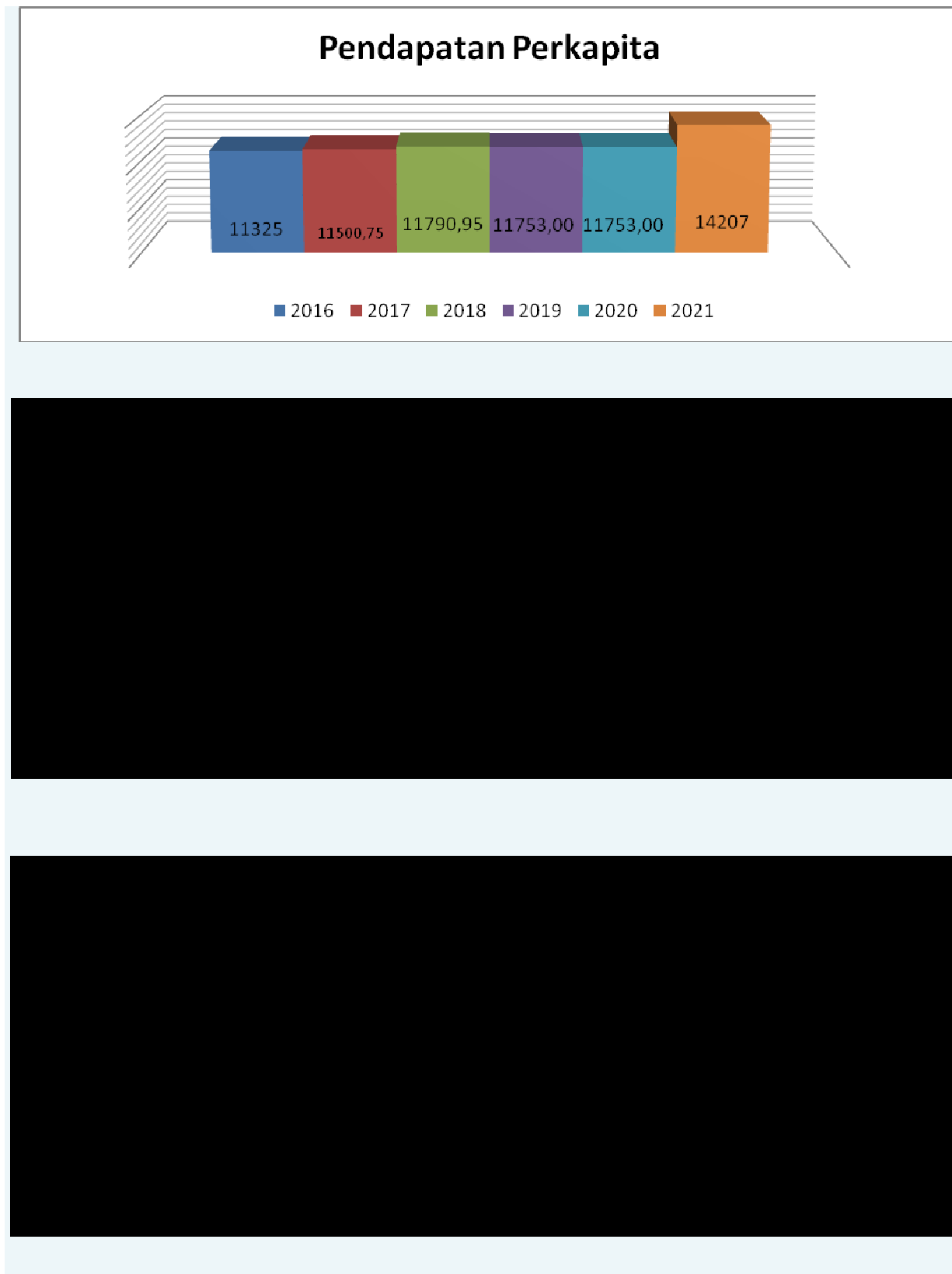
Realisasi dari indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 6,64% dari target 6,15%. Namun dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 0,24% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 sebesar 6,15%, maka capaian tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 92,69%.

Faktor permasalahan antara lain:

1. Terjadinya kenaikan angka kemiskinan antara tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu sebesar 0,24%;
2. Adanya pandemi Covid-19, telah mengakibatkan terganggunya sektor ekonomi riil masyarakat.



Grafik 3.13
Perbandingan Capaian Per Kapita, Indeks Gini dan Angka Kemiskinan
Kabupaten Bengkalis dari tahun 2018-2020



Sumber : BPS Tahun 2021 (diolah)

Sasaran 10 :

“Meningkatnya Kesejahteraan Petani”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani (Pertanian, Perkebunan, Perikanan), telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar **147,71%** (Tabel 3.14).

Tabel 3.14
Realisasi Indikator Sasaran 10

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Nilai Tukar Petani (Pertanian, Perkebunan, Perikanan)	Tanpa Satuan	105,50	110,58	97,70	95,59	118,77	95,00	140,32	147,71	95	147,71
Rata - Rata Capaian										147,71		

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu 2021 (Data Diolah)

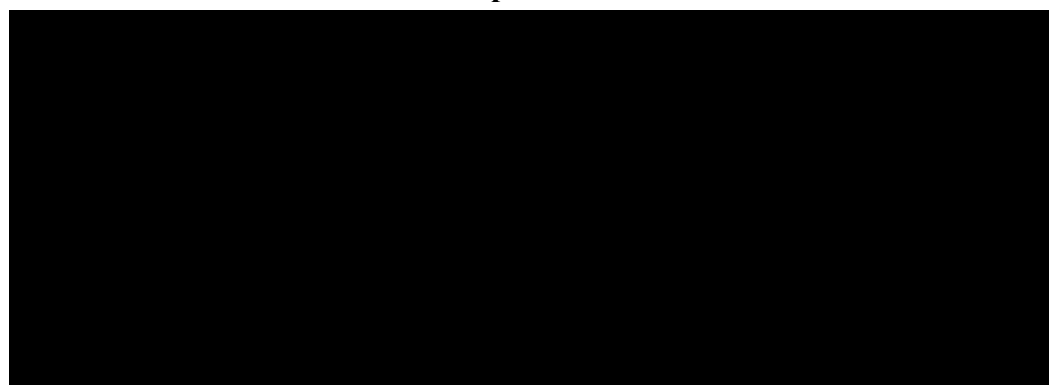
Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

1. Terjadinya kenaikan NTP pada tahun 2021 disebabkan nilai kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian, perkebunan dan perikanan, dimana semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani pada sektor-sektor tersebut;
2. Naiknya nilai produktivitas hasil Perkebunan, Pertanian dan Perikanan;
3. Turunnya nilai inflasi Kabupaten Bengkulu;
4. Adanya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian telah membantu secara signifikan untuk meningkatkan NTP.

Rekomendasi

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari komoditi perkebunan, Pertanian dan Perikanan;
2. Memfasilitasi pemasaran komoditi perkebunan, Pertanian, dan Perikanan untuk meningkatkan daya jual dan pendapatan petani yang lebih baik;
3. Melakukan operasi pasar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

Grafik 3.14
Capaian NTP



Sasaran 11 :


“Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup”

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja bahwa persentase capaian sebesar **94,07%** telah melebihi target yang ditetapkan (Tabel 3.15).

Tabel 3.15
Realisasi Indikator Sasaran 11

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	-	63,17	63,44	70,33	70,67	75	70,55	94,07	75	94,07
Rata - Rata Capaian									94,07			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2021



Berdasarkan Tabel 3.15 di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari indikator IKLH ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 70,55% dari target 75%. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan namun nilai IKLH sebesar 70,55%, masih termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu telah melaksanakan **upaya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**.

Faktor permasalahan antara lain:

- a. Lemahnya pengawasan pemerintah Kabupaten Bengkulu terhadap perilaku badan usaha dalam kepatuhan pengendalian dampak lingkungan, seperti pembuangan air limbah industri, pembakaran hutan dan pengendalian dampak lingkungan lainnya;
- b. Lemahnya penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan hidup;
- c. Tingginya tingkat abrasi di pesisir Pulau Bengkulu, Rupat dan Pesisir daratan Sumatera wilayah Kabupaten Bengkulu;
- d. Masih tingginya tingkat kebakaran lahan gambut dan hutan di Kabupaten Bengkulu.

Solusi/pemecahan masalah:

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan lahan perkebunan, pertanian maupun kegiatan industri lainnya;
2. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan, baik yang dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan;
3. Peningkatan indeks kualitas air, dengan cara melakukan upaya penurunan beban pencemar pada sumber pencemar badan air, antara lain dengan memulihkan kualitas air pada badan air sungai serta meningkatkan kualitas pemantauan dan pengujian kualitas air pada badan air atau aliran sungai secara periodik;
4. Meningkatkan persentase luas tutupan lahan (hutan dan non hutan) yang ada di Kabupaten Bengkulu, antara lain dilakukan dengan peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penghijauan untuk ekosistem daratan, dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir khususnya mangrove, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
5. Membangun turap dan pemecah gelombang di sepanjang pesisir Pulau Bengkulu, Rupat dan Pesisir daratan Sumatera wilayah Kabupaten Bengkulu;

6. Meningkatkan pengawasan fungsi hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer dan sekunder, hutan rawa primer dan sekunder dan hutan tanaman, untuk pengendalian alih fungsi lahan terutama alih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit;
7. Mengaktifkan pos pengawasan dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

MISI III MEWUJUDKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sasaran 12 :

“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Antar Wilayah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja bahwa rata-rata persentase capaian sebesar **132,567%** (Tabel 3.16), dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.16
Realisasi Indikator Sasaran 12

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	49,22	52,60	48,56	47,5	52,53	65,79	61,96	94,18	65,79	94,18
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang berfungsi baik	Unit	88	97	97	98	98	96	99	103,125	96	103,125
3.	Jumlah Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Penyebrangan	Orang/ barang	796.008	991.499	1.248.956	1.368.070	832.251	230.236	915.258	397.530	230.236	397.530
Rata - Rata Capaian										132,576		

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan 2021

1. Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik

Berdasarkan Tabel 3.15 di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari Indikator Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 61,96% dari target 65,79%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 9.43%.

Berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 209/KPTS/IV/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten tahun 2018 bahwa jumlah panjang ruas jalan Kabupaten Bengkalis adalah 1.257,10 km, panjang jalan tersebut hanya merupakan jalan poros atau jalan strategis dan belum termasuk jalan lingkungan sepanjang 308,72 km. Sehingga panjang ruas jalan Kabupaten Bengkalis seluruhnya adalah 1.565,82 km. Sedangkan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik untuk ruas jalan poros adalah 630,17 km dan ruas jalan lingkungan adalah 340,01 km. Sehingga total Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik tahun 2021 adalah 970,18 km atau sebesar 61,96%.

2. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang berfungsi baik

Realisasi Indikator Kinerja jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang berfungsi baik telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99 unit dari target 96 unit, sehingga capaiannya mencapai 108,125%.

3. Jumlah Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Penyebrangan


Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Penyebrangan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 915.258 unit dari target 230,236 unit, sehingga capaiannya mencapai 397,530%.

Faktor-Faktor keberhasilan antara lain:

1. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang berfungsi baik

- a. Adanya penambahan pembangunan pelabuhan laut (steiger) di Kecamatan Rupert Utara;
- b. Adanya pemeliharaan dan fungsionalisasi seluruh pelabuhan laut dan Terminal Bis yang berada di Kabupaten Bengkalis;
- c. Pembangunan terminal dan pelabuhan telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukkan dan kebutuhan mobilitas masyarakat;
- d. Ketersediaan sumber anggaran dan lahan yang memadai.

2. Jumlah Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Penyebrangan

- 
- a. Telah difungsikannya 2 (dua) Dermaga di Air Putih dan 2 (dua) dermaga di Sungai Selari untuk operasional 5 (lima) kapal penyeberangan. Faktor inilah menjadi salah satu peningkatan yang signifikan dalam arus penumpang dan barang yang menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Pulau Sumatra;
 - b. Semakin meningkatnya jumlah kunjungan di Pulau Bengkalis khususnya pada hari-hari libur, untuk kunjungan wisata di kawasan wisata Selat Baru, situs-situs sejarah dan adanya Mahasiswa/i Perguruan Tinggi yang berasal dari luar Kabupaten Bengkalis;
 - c. Terjadinya lonjakan penumpang pada hari-hari besar keagamaan khususnya pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Perayaan Imlek;
 - d. Adanya kunjungan presiden dan beberapa pejabat negara lainnya, seperti Menteri KLHK, MENPAREKRAF, Kepala Staf Kepresidenan dan lain-lain ke Kabupaten Bengkalis.

Faktor permasalahan antara lain:

1. Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik
 - a. Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis yang anggarannya lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan;
 - b. Adanya rasionalisasi dan refocusing APBD Kabupaten Bengkalis akibat pandemi Covid 19;
 - c. Kurangnya konsolidasi internal antara Perangkat Daerah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

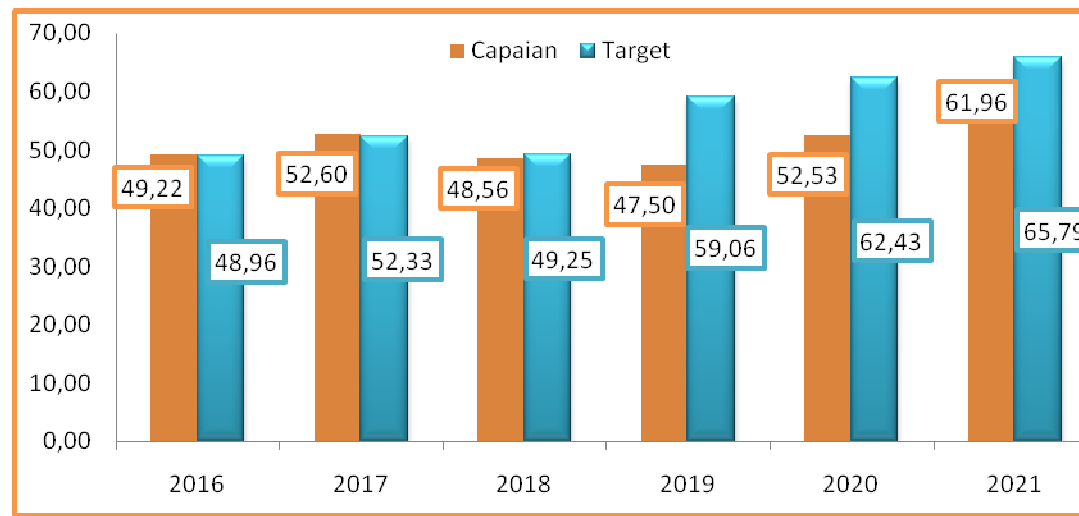
Solusi/pemecahan masalah:

1. Melakukan upaya pengajuan rencana anggaran pembangunan jalan dari sumber dana Provinsi Riau dan APBN;



Grafik 3.15

Capaian Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik



Grafik 3.16

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang Berfungsi Baik



Sasaran 13 :**“Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Utilitas Umum”**

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja, persentase capaiannya sebesar **286,73%**, dengan predikat **sangat Tinggi**.

Tabel 3.16
Realisasi Indikator Sasaran 13

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun RPJMD					2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	%	9,8	6,45	14,19	30,32	46,45	30	107,53	358,43	30	358,43	
Rata - Rata Capaian												358,43	

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup 2021

Pengukuran indikator kinerja cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kondisi terpenuhi dan berfungsi dengan baik pada tahun 2021, meliputi jalan lingkungan, drainase/air limbah, sanitasi, jaringan air minum, RTH, rumah ibadah dan jaringan nirkabel.

Berdasarkan pada Tabel 3.16 di atas bahwa realisasi indikator kinerja cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 107,53% dan dinilai telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 30% dengan capaian sebesar 358,43%, dengan demikian dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Faktor keberhasilan antara lain:

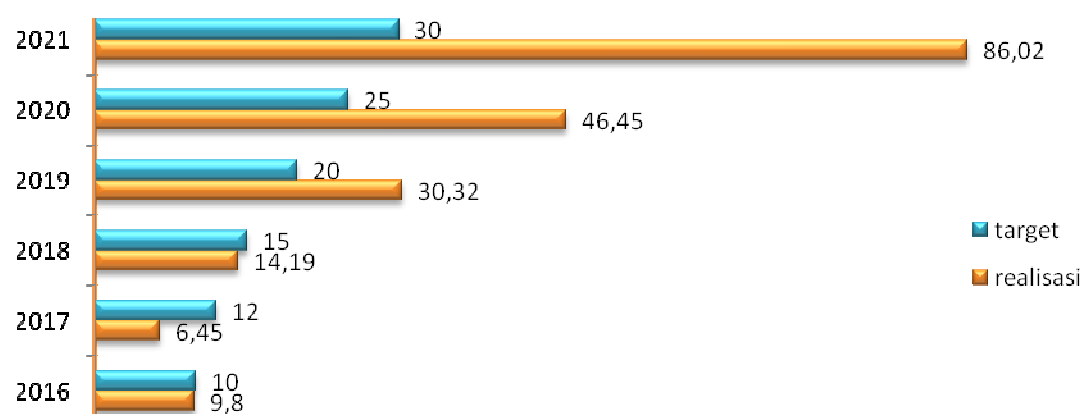
1. Adanya Pemerataan Cakupan PSU baik di kelurahan maupun desa di Kabupaten Bengkalis;
2. PSU merupakan hal yang penting bagi meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman di Kabupaten Bengkalis yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, selain itu keseriusan Pemerintah Daerah dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam mengejar ketertinggalan penyediaan infrastruktur

khususnya pada kawasan permukiman harus mendapat apresiasi penuh serta dukungan dari berbagai pihak (*stockholder*) dan masyarakat;

3. Adanya komitment dari Pemerintah Kabupaten Bengkalistahun 2016-2021 untuk memenuhi kebutuhan PSU bagi masyarakat;
4. Tingginya animo masyarakat melalui pokok pokok pikiran dari legislatif dalam penyediaan PSU bagi konsituennya;

Grafik 3.17

Capaian Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)



3.2 REALISASI ANGGARAN

Data yang digunakan dalam perhitungan realisasi anggaran ini adalah berdasarkan data APBD tahun 2021, dengan target anggaran pencapaian kinerja tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.17. Penyerapan anggaran Belanja Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.1.403.462.330.497,00 atau 92,55% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.516.402.123.576,00. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup, yaitu sebesar 99,30%. Sedangkan, penyerapan anggaran terkecil terdapat pada sasaran Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah yaitu 75,71%(Tabel 3.17).

Tabel 3.17

Pencapaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi per Sasaran dan Anggaran Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian (%)	Anggaran			
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pelayanan publik	110,21	104.223.311.528,00	93.083.458.545,00	88,31	10,69
2	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	144,65	14.807.764.049,00	13.729.112.245,00	92,72	7,28
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah	100	431.707.291.804,00	420.943.317.013,00	97,51	2,49
4	Meningkatnya kualitas pendidikan	103,66	306.589.731.090,00	264.122.227.552,00	86,15	13,85
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	82,30	146.397.145.674,00	125.220.732.850,00	85,53	14,47
6	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	125,87	1.249.755.500,00	1.230.191.459,00	98,43	1,57
7	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	34,06	14.899.929.600,00	11.280.471.189,00	75,71	24,29
8	Meningkatnya nilai investasi	284,78	792.901.200,00	712.877.300,00	89,91	10,09
9	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	95,17	43.190.723.200,00	41.721.622.465,00	96,60	3,40
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	147,71	18.330.821.325,00	17.063.057.586,00	93,08	6,92
11	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	94,07	22.028.051.720,00	21.872.859.550,00	99,30	0,70
12	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah	132,576	267.609.611.586,00	257.041.568.558,00	96,05	3,95
13	Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	358,43	144.575.084.300,00	135.450.834.185,00	93,69	6,31
Total		139,50	1.516.402.123.576,00	1.403.462.330.497,00	92,55	7,45

Berdasarkan Tabel 3.17 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara keseluruhan menunjukkan tingkat penghematan anggaran sebesar Rp. 112.939.793.079,00 (7,45%). Ini berarti bahwa pencapaian kinerja dari sisi pelaksanaan program telah dicapai dengan cara yang efisien, karena realisasi anggaran lebih kecil (92,55%) dibandingkan rata-rata capaian indikator kinerja yaitu (139,50%), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,6.

3.3 Inovasi Daerah

Untuk menunjang keberhasilan kinerja, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis telah membuat beberapa terobosan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya :

1. Jemput bola Masif dan Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Jebol Master)

Inovasi ini adalah inovasi yang baru di Kabupaten Bengkalis bahkan di Indonesia karena melakukan pelayanan hingga kerumah penduduk, lansia, disabilitas, ODGJ dan lain-lain. Inovasi ini menyelesaikan tantangan pembangunan daerah karena selama ini penduduk Kabupaten Bengkalis sulit untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Akta Kelahiran, KIA dan dokumen kependudukan lainnya, namun setelah ada inovasi ini masyarakat menjadi mudah mendapatkan layanan, sehingga capaian penduduk yang memperoleh dokumen kependudukan semakin meningkat, setelah implementasi program inovasi JEBOL MASTER terjadi kenaikan persentase kepemilikan KTP hingga 100%, Akta Kelahiran 90,31%, dan Kartu Identitas Anak sebanyak 40,26%. Dengan rata2 kenaikan sebesar 25,07% dari 2019 ke 2021.

JEBOL MASTER merupakan kegiatan dari Disdukcapil dalam menjangkau dan memberi layanan kependudukan kepada penduduk di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bengkalis. Petugas turun ke lapangan untuk lebih menjamin keterjangkauan pelayanan Disdukcapil Bengkalis sampai ke tengah warga. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil melakukan program pelayanan jemput bola. Pelayanan dengan sistem jemput bola dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara mendatangi masyarakat dan melaksanakan pelayanan di tempat.

2. Aplikasi “Bengkalis Menawan” (PARBUDPORA)

Bengkalis Menawan adalah sebuah aplikasi mobile yang menyediakan informasi pariwisata yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang menyediakan informasi wisata, akomodasi, kuliner, event, oleh-oleh dan lain sebagainya.

Tujuan dari aplikasi ini adalah sebagai portal informasi bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bengkalis. Sebelum ada Aplikasi Bengkalis Menawan jumlah kunjungan wisata sebanyak 42.397 orang dan setelah implementasi program inovasi

Bengkalis Menawan kunjungan wisatawan meningkat menjadi 103.635 orang (1,44%).

Alamat atau link aplikasi Bengkalis menawan ini adalah <https://disparbudpora.bengkaliskab.go.id/>.

3. Aplikasi Pendaftaran Online (APO) (RSUD BKS)

Aplikasi Online RSUD Bengkalis ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, berupa pendaftaran secara online, informasi jadwal dokter dan informasi pelayanan unggulan lainnya.

Sejak diluncurkannya pada akhir tahun 2019, masyarakat yang telah menggunakan aplikasi ini untuk mendapat pelayanan sebanyak 341 orang. Aplikasi ini menjadi lebih vital fungsinya semenjak adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya aplikasi ini telah berhasil menciptakan suatu kondisi tidak terjadi kontak langsung dengan tenaga kesehatan RSUD Bengkalis, sehingga secara langsung dapat mencegah penyebaran Covid-19, meskipun jumlah pasien selama pandemi dibatasi.

Penggunaan Aplikasi ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan adanya data tingkat kepuasan masyarakat sebelum adanya aplikasi sebesar 69,63 dan setelah adanya aplikasi tingkat kepuasan sebesar 77,11 atau meningkat 7,18 %

4. SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan) (SIAP KECIL)

Sistem Informasi Administrasi Pelayanan (SIAP) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk merekam aktivitas surat masuk dan surat keluar dalam bentuk data maupun file digital. SIAP bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian dan cetak arsip surat yang telah tersusun secara sistematis. SIAP Versi 1.0 ini mampu membuat, menyimpan dan mencetak surat keluar dengan penomoran surat secara otomatis, serta membuat datapencarian (buku agenda) surat masuk dan keluar hal ini mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Alamat atau link aplikasi SIAP ini adalah <http://appsiakkecil.id/> dapat di buka melalui web browsing Google Chrome ataupun Mozilla firefox.

3.4 Prestasi dan penghargaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Beberapa prestasi dan penghargaan sebagai wujud keberhasilan kinerja pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah diraih sepanjang tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

1. Penghargaan Dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut, sejak tahun 2013;
2. Penghargaan dari Ombudsman RI atas peningkatan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2021;
3. Penghargaan persentase tertinggi realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota terbaik 1 se-Indonesia tahun 2021 dengan realisasi sebesar 120,68%;
4. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama tingkat Nasional tahun 2021;
5. Perpustakaan Kabupaten Terbaik peringkat ke-13 se-Indonesia;
6. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah (BAK) Kemendagri atas keaktifan melaporkan pelaksanaan penegakan prokocol kesehatan (Prokes) Covid-19;
7. Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah terbaik 1 tingkat Provinsi Riau;
8. Penghargaan predikat penyaluran DAK fisik tahun 2021 terbaik 1 tingkat Provinsi Riau;
9. Hasil pengawasan kearsipan eksternal tahun 2021 peringkat ke-4 se Kabupaten di Provinsi Riau;
10. Penobatan anugrah sebagai daerah informatif pada ajang Anugrah Komisi Informasi Provinsi Riau tahun 2021;
11. Peringkat ke-2 program Kota Bersih Tingkat Provinsi Riau;
12. Peringkat Pertama dalam kategori Program Setia Lestari Bumi Pemerintah Provinsi Riau;
13. dan lain-lain.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, secara umum menunjukkan pencapaian sasaran kinerja dengan kategori Sangat Berhasil 76%, Berhasil 4% dan Kurang Berhasil sebesar 16%.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mencapai target kinerja 13 sasaran yang terdiri dari 25 indikator kinerja diperlukan anggaran sebesar Rp. 1.516.402.123.576,00, sedangkan capaian target kinerja tahun 2021 sebagian besar dengan kategori sangat berhasil (76%) atau telah melebihi target yang ditetapkan.

Suatu penggunaan sumber daya dikatakan efisien apabila input dibagi output hasilnya lebih kecil dari 1 (satu). Input adalah jumlah anggaran yang digunakan, sedangkan output merupakan capaian indikator kinerja. Berdasarkan tabel 3.17 terlihat bahwa input (92,55%) lebih kecil dari rata-rata capaian indikator kinerja (output) dari 13 sasaran (139,50%). Dengan demikian, dapat diasumsikan hasil perbandingan input dan output kurang dari 1 (satu), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja sasaran sudah efisien.

Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah telah melakukan penyelarasan dokumen perencanaan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, yang salah satunya adalah dengan melakukan revisi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021;



2. Realisasi atas Perjanjian Kinerja maupun Indikator Kinerja Utama tahun yang lalu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi tim anggaran untuk memberikan anggaran terhadap Perangkat Daerah terkait;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja per triwulan pada Perangkat Daerah;
4. Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat bagi seluruh Perangkat Daerah dimanfaatkan untuk memberikan pengukuran keberhasilan kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah;
5. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Zona Integritas terhadap OPD yang menangani Pelayanan Publik;
6. Membuat sistem E-SAKIP yang menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

61

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum mampu secara sempurna menyajikan data dan informasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kritik dan saran yang sifatnya membangun diharapkan dari seluruh pemangku kepentingan.

Semoga LAKIP Tahun 2021 bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di masa yang akan datang.